

FAUZI, S. Sos., MA



# POLITIK ISLAM

Perspektif Nurcholish Madjid  
Serta Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Intelektual Islam  
Indonesia



**Politik Islam Perspektif Nurcholish  
Madjid Serta Pengaruhnya Terhadap  
Kebangkitan Intelektual Islam  
Indonesia**

**FAUZI, S. Sos. MA**



**STAIN SAR**  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
**press**

**Politik Islam Perspektif Nurcholish Madjid Serta  
Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Intelektual Islam  
Indonesia**

All rights reserved  
© 2022, Indonesia: Bintan

**FAUZI, S. Sos. MA**

**ISBN: 978-623-95003-6-8**

**Editor:**  
Doni Septian, M.IP

Penyunting:  
P3M STAIN KEPRI

**Lay Out dan Design Cover:**  
Syahrul Rahmat, M.Hum.

**Diterbitkan oleh STAIN SULTAN ABDURRAHAMAN PRESS  
Jalan Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk, Bintan, Kabupaten  
Bintan**

**Cetakan Pertama, Februari 2022**

**FAUZI, S. Sos. MA**

ix + 85 page 15,5 x 23,5 cm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# PRAKATA

## *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadhirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan ma'unah-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam kita kirimkan semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW.

Buku ini merupakan kajian pendalaman terhadap skripsi penulis di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di awal melanium ini. Kenapa tema ini diangkat? Sebab, walaupun politik Islam atau, khususnya lagi, hubungan Islam dan negara tidak begitu mencuat ke permukaan pada saat ini, akan tetapi bukan berarti persoalan itu telah tenggelam dan hilang. Persoalan hubungan Islam dan negara selalu muncul di saat hal itu memang dianggap tepat pada waktunya.

Oleh sebab itu persoalan bagaimana Islam di posisikan terhadap negara menjadi persoalan yang selalu hangat dan perlu mendapat perhatian. Dengan demikian pandangan tokoh legenda Indonesia, Nurcholish Madjid menjadi penting untuk diangkat.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, *pertama*, untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Hasan, dan Bunda Rosmah. Keduanya telah memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan dasar agama, ngaji al-Quran, dan lain sebagainya. Keduanya mengajarkan mencintai buku dan ilmu pengetahuan, walaupun keduanya tidak mengenyam pendidikan yang tinggi. Izinkan, anakmu menyampaikan ucapan terima kasihm sekali lagi, sebab kaerna jasa-jasa ayah-bunda berdua, anakmu ini memiliki semangat yang tinggi untuk merubah hidup yang sangat terbatas. Semoga Allah swt menjadikan semua usaha ayah-

bunda itu sebagai amal shalih di sisi-Nya. Kedua, ucapan yang sama juga untuk isteriku, yang selalu sabar mendampingi, sabar dalam masa-masa sulit, dan memberikan perhatian yang besar yang memang sangat dibutuhkan, termasuk memberikan cinta. Juga, untuk empat orang buah hati kami, Ahmad Fairuz AlFatih, Ahmad Syamil Al-Faruqi, Sayyida Putri Humaira, dan si kecil Sayyida Khadijah Malika yang begitu menyayangi ayah dan bunda mereka, senyum dan tawa mereka menghilangkan rasa letih, lelah, dan rasa sakit yang sering penulis alami.

Ketiga, yang tidak dapat penulis lupakan adalah jasa dan segala kebaikan yang penulis peroleh ketika menimba ilmu di UIN Syarif Hidayatullah dulu, ada Hj. Umi Sa'anah, Abi, H. M. Arsan, Bu Kokom Komariah yang selalu memberikan motivasi untuk penulis, bang Aziz, dan Mbay (Sobaruddin) satu keluarga yang memiliki kemuliaan jiwa yang banyak memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan S-I penulis di UIN Syarif Hidayatullah.

Selain itu, ada keluarga RT Nana Suharna, yang juga memiliki kontribusi penting dalam hidup penulis, ada keluarga Bik Siti, Sahabatku Mas Adi, Engkus dan lain-lain. Juga tidak dapat dilupakan kawan2 penulis dari kampung, ada bang Jaf, Fuad, Iyan, dan terakhir bang Udin. Terima kasih atas semua bantuannya.

Semoga penelitian ini menjadi salah satu solusi bagi mengatasi persoalan hubungan Islam dengan negara di mana dan kapanpun.

Bintan, Februari 2022

Penulis

## **SAMBUTAN**

Puji syukur kami ucapkan atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT sehingga buku hasil penelitian mandiri dosen yang berjudul “Politik Islam Perspektif Nurcholish Madjid Serta Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Islam Indonesia” dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Tujuan penerbitan buku hasil penelitian ini adalah untuk mengakselerasi implementasi tri dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan indikator kinerja di dunia akademis. Kami dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau akan terus mengembangk-an khazanah ilmu pengetahuan dengan menerbitkan beberapa judul buku setiap tahunnya, dimana diantaranya adalah publikasi hasil penelitian mandiri, kerja sama dan kompilasi hasil peneliti-an dosen bersama dengan mahasiswa yang dikonversikan menjadi buku.

Besar harapan kami agar hasil penelitian-penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi khalayak ramai, terutama untuk dunia akademik serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan pada skala nasional maupun internasional. Dengan diterbitkan dalam bentuk buku cetak maupun *electronic book*, maka khazanah keilmuan akan lebih mudah disebarluaskan.

Buku ini dapat tersusun berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta secara aktif dalam penyusunan buku ini.

Plt. Kepala P3M STAIN  
Sultan Abdurrahman Kepri

Doni Septian, M.IP

# **SEKAPUR SIRIH**

“POLITIK ISLAM PERSPEKTIF NURCHOLISH MAJID  
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEBANGKITAN  
INTELEKTUAL ISLAMINDONESIA

Oleh : H. HARDI SELAMAT HOOD, Ph.D  
Ketua Dewan Penyantun STAIN SAR Kepulauan Riau

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt, biqauli alhamdulillah rabbil ‘alamin. Atas pertolongan dan kemudahan darinya, kita dapat diberikan kesempatan membaca dan menelaah buku yang ditulis oleh sahabat saya, Ustadz Fauzi, S.Sos, MA ini. Bagi saya sebuah kehormatan diminta untuk memberikan tulisan Sekapur Sirih atas bukunya yang penuh dengan pemikiran-pemikiran dan analisa dalam politik Islam dari seorang Nurcholish Majid yang melegenda.

Sebagai sebuah buku yang membedah tentang politik tentu saja akan menjadi sebuah kajian menarik. Menariknya adalah bisa saja ditemukan perbedaan padangan yang pantas untuk dikaji lebih dalam atau lebih lanjut. Kekuatan catatan sejarah politik tentu saja adalah bagaimana seorang penulis dapat dengan cermat dan teliti untuk memperkaya kelilmiahan buku tersebut.

Seorang Ustadz Fauzi, telah berusaha memenuhi kriteria diatas dan menjadikan buku ini sebagai sebuah buku yang pantas dibaca dan dijadikan sebagai sebuah referensi. Keinginan sesungguhnya yang saya lihat dalam buku ini adalah keinginan penulis membuka gagasan-gagasan bernas melakukan konfigurasi Islam dan Politik. Saya yakin setelah membaca buku ini, akan ditemukan kelapangan semangat dan jiwa berpolitik dalam ummat Islam dengan saling menghormati atas perbedaan.

Tahniah buat Ustadz Fauzi, semoga kehadiran buku ini menjadi lading amaljariyah.

Wasalam

Hardi Selamat Hood

# DAFTAR ISI

PRAKATA .....	iii
SAMBUTAN .....	v
SEKAPUR SIRIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II ISLAM DAN POLITIK DALAM LINTASAN SEJARAH .....	11
A. Hubungan Islam dan Politik Era Klasik .....	11
1. Masa Khulafaurrasyidin .....	11
a. <i>Khalifah Abu Bakar</i> .....	11
b. <i>Umar Bin Khatab</i> .....	14
c. <i>'Usman Bin Affan</i> .....	16
d. <i>Ali Bin Abi Thalib</i> .....	20
2. Era Pasca Khulafaur Rashidin .....	21
3. Keruntuhan Khilafah Islamiyah .....	23
B. Pemikiran Kenegaraan Umat Islam Indonesia .....	27
1. Paradigma Integral: Konsep M. Natsir .....	27
2. Paradigma simbiotik: Konsep Amien Rais .....	30
3. Paradigma Sekuler: Konsep Soekarno .....	31
BAB III NURCHOLISH MADJID DAN POLITIK ISLAM .....	37
A. Mengenal Nurcholis Madjid .....	37
1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Sosial Politik .....	37
2. Aktivitas dan Arus Modernisasi .....	40
B. Islam dan Politik Menurut Nurcholish Madjid .....	46
1. Nurcholish Madjid, Partai Islam , dan Negara Islam ...	46
BAB IV KONFIGURASI HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: IMPLIKASI DARI GAGASAN DEPOLITISASI ISLAM NURCHOLISH MADJID .....	63
A. Konfigurasi Hubungan Islam dan Negara: Implikasi Gagasan Depolitisasi Islam Nurcholish Madjid .....	63
B. Bangkitnya Kesadaran Intelektual Pasca Berkembangan Pembaharuan Pemikiran Islam .....	68
BAB V PENUTUP .....	77



DAFTAR PUSTAKA .....	79
DAFTAR GLOSARIUM .....	82
DAFTAR INDEKS .....	85

# BAB I

## PENDAHULUAN

Agama adalah salah satu hak asasi yang paling penting bagi manusia. Agama adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang dibekalkan oleh Tuhan sebelum manusia itu terlahir. Dalam konsep Islam beragama itu adalah fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia sebelum manusia tercipta.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, agama, bagi orang Islam yang paripurna,<sup>2</sup> lebih penting dari kehidupan itu sendiri. Sebab itu pula banyak yang rela melakukan apapun dan bahkan mati, hanya karena demi mempertahankan atau memperjuangkan agamanya. Sejarah dunia juga mencatat sekian banyak nyawa yang melayang disebabkan perang demi agama. Salah satu perang yang besar yang tidak bisa dilupakan orang adalah Perang Salib. Perang yang terjadi dengan menegaskan simbol-simbol agama ini terjadi hampir dua ratus tahun ini (1096-1271 M).

---

<sup>1</sup>Dalam al-Quran Surah al-A'raf ayat 172 menggambarkan hal tersebut. Terjemah ayat tersebut berbunyi” *ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari rusuk anak Adam anak keturunannya dan Allah meminta persaksian kepada mereka, benarkah Aku ini Tuhanmu? Ruh serentak menjawab, benar, Engkaulah Tuhan kami*”. Menurut Para ulama, ayat ini adalah penegasan bahwa Allah menciptakan manusia disertai dengan potensi berkeyakinan kepada Allah swt, sebagai satu-satunya Tuhan. Dengan kata lain, bahwa manusia lahir telah memiliki potensi memiliki keyakinan kepada Tuhan dan Tuhan itu Maha Esa. lihat, Nashr Abdul Karim al-‘Aql, *Mabahits fi ‘Aqidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah wa mauqif alharakat al-Islamiyah al-Mu’ashirah, ttp, tt, hlm. 18*. Dalam hadits Nabi yang terkenal pun menjelaskan,” setiap (bayi) terlahir dalam keadaan fitrah.”(HR. Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Muassasah al-Risalah, 1995, hlm. 1006. Fitrah di sini semakna dengan ayat tersebut di atas.

<sup>2</sup> Disebut “orang Islam yang paripurna” karena meyakini dan menjalankan Islam secara total. Dan tentu tidak semua orang Islam dapat dimasukkan dalam kelompok ini.

Sejarah bangsa Indonesia juga tidak dapat luput dari pertentangan dengan dasar agama, baik antara agama maupun inter agama. Hampir setiap agama mengalami gejala pertentangan mengenai ajarannya. Islam, juga mengalami hal itu. Dan bahkan pertentangan antar organisasi Islam yang berbeda ideologi.

## **Gambaran Sepintas Politik Islam vis a vis Negara di Era Orde Lama**

Dalam konteks politik,<sup>3</sup> sejarah mencatat terjadi pertentangan yang hebat antara kelompok nasionalis-Muslim dimotori oleh Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan Mohammad Natsir sebagai lokomotifnya dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Soekarno, padahal kedua tokoh partai tersebut adalah Muslim. Masalah yang memicu perdebatan adalah kelompok yang disebut pertama menginginkan beragama secara *kaffah*<sup>4</sup> (seluruh aspek harus disesuaikan dengan aturan Islam termasuk bernegara). Artinya, Indonesia harus didasarkan kepada Islam. Bagi kelompok ini, Islam bukan hanya ajaran spritual-individual (sekuler), akan tetapi juga ajaran yang komplit (*syamil*), dari

---

<sup>3</sup>Konteks politik di sini, maksudnya pertentangan mengenai dasar negara yang akan didirikan. Satu kelompok Islam (Nasionalis-Muslim) menginginkan dasar negara itu adalah Islam. Sedangkan kelompok lain yang juga penganut Islam (Nasionalis-Sekuler) tidak menginginkan Islam sebagai dasar negara Indonesia.

<sup>4</sup>Keinginan beragama secara *kaffah* bukan tanpa alasan. Kata *kaffah* diartikan sebagai paripurna (menyeluruh) memang secara gamblang dijelaskan Allah swt di dalam al-Quran, dalam surah al-Baqarah ayat 208). Jadi sebenarnya bukanlah suatu hal yang luar biasa apalagi berlebihan, persoalannya adalah dengan cara dan metode apa untuk mendapatkan itu.

mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Sedangkan Nasionalis-Sekuler memandang Islam hanya ajaran spritual-individual. Jadi agama tidak perlu menjadi urusan negara (politik). Permasalahan itulah yang meng-habiskan waktu yang panjang dan energi yang banyak. Perdebatan yang panjang itu benar-benar menghabiskan waktu dan energi yang demikian besar sehingga bangsa Indonesia sangat terlambat dalam berbagai bidang pembangunan termasuk bidang pendidikan, teknologi, inprastruktur dan bahkan politik.

Perdebatan yang secara ril dan resmi dimulai di tahun 1945 itu diawali ketika Jepang membentuk satu Badan yang dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*) pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April di tahun yang sama.<sup>5</sup>

Sebenarnya kalau kita lihat kembali peran penting Islam untuk kemerdekaan Indonesia, tidak ada siapa dan golongan manapun yang bisa membantah akan hal itu. Akan tetapi peran yang begitu besar itu dibuang dari ingatan, dan apalagi oleh Jepang. Oleh sebab itu di Badan yang merupakan cikal-bakal lahirnya negara Indonesia itu (BPUPKI), kelompok Islam hanya diwakili oleh 11<sup>6</sup> orang dari 62 anggota. Menurut Bachtiar Effendy, Jepang, memang memberikan dukungan kepada para pemimpin kubu nasionalis. Jepang lebih mempercayai kalangan Nasionalis-Sekuler untuk memimpin negara Indonesia ke

---

<sup>5</sup> Sebelum dibentuknya Badan itu, sebenarnya sudah sering terjadi perdebatan antara Agus Salim, Ahmad Hassan, dan Mohammad Natsir dengan Seoakarno, Syahrir, Moh. Hatta, dan Supomo. Tema perdebatan itu benar-benar tentang dasar negara.

<sup>6</sup> Tokoh-tokoh Islam yang masuk dalam BPUPKI itu adalah Abdul Halim, KH. Masjkur, H. Ahmad Sanusi, KH. Masmansjur, Abikusno, Tjokrosujoso, Dr. Sukiman, KH. A. Wahid Hasyim, dan A. Baswedan.

depan.<sup>7</sup> Termasuk Dewan Penasehat (*Sanyo Kaigi*), lembaga yang menjadi cikal-bakal kabinet ini dianggotai oleh Soekardjo, Soewandi, Supomo, Abikusno Rjokrosujoso, Buntaran Martoatmodjo, Hi Hajar Dewantara, M. Hatta, Rasyidi, Samsi, RM. Sartono, dan Singgih.

Puncak dari hasil kerja keras BPUPKI itu melahirkan apa yang kita kenal sekarang dengan Pancasila yang terdiri dari lima dasar untuk negara Indonesia merdeka. Lima Dasar atau Pancasila Soekarno itu adalah “*kebangsaan* (nasionalisme), *Internasionalisme* atau *prikemanusiaan*, *musyawarah* atau *demokrasi*, *kesejahteraan sosial*, dan *Ketuhanan*.”

Pancasila yang disampaikan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah gagasan kompromi untuk semua kelompok penduduk Indonesia. Dan karena belum dianggap sempurna, akhirnya dibentuklah apa yang disebut dengan Panitia Sembilan.<sup>8</sup> Panitia yang diketui Soekarno ini akhirnya melahirkan apa yang dikenal Piagam Jakarta (the Jakarta Charter) di samping perubahan Lima Dasar Pancasila rumusan Soekarno.

Pada intinya, Piagam ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dengan penambahan bahwa sila Ketuhanan dilengkapi menjadi “Percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.”<sup>9</sup>

Lahirnya Piagam Jakarta merupakan keberhasilan terbesar para tokoh Nasionalis-Muslim. Dengan Piagam itu mereka yakin bahwa negara akan segera mengakomodir sila pertama

---

<sup>7</sup> Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 84. Dan sebagai ketua BPUPKI, Jepang menunjuk Dr. Radjiman Wediodiningrat. Sedangkan wakil ketua terdiri dari dua orang, satu orang berkebangsaan Jepang, Ichibangase, satu lagi orang Indonesia, R.P. Soeroso

<sup>8</sup> Panitia ini terbentuk pada tanggal 10 Juli 1945

<sup>9</sup> Bachtiar, *Ibid*, hlm. 88

Piagam Jakarta itu dan menetapkan negara Indonesia sebagai negara yang menjalankan syariat.

Piagam Jakarta menjadi harapan yang paling serius untuk melahirkan negara syariat. Para politisi Muslim tentu sudah membayangkan akan pelaksanaan ajaran Islam terhadap masyarakat Islam, walaupun belum tentu mereka sudah bisa membayangkan bagaimana pelaksanaannya karena melaksanakan hukum syariah secara total tentu membutuhkan banyak hal, seperti dalam konteks hukum (fikih) mazhab apa yang harus dipakai, dan sebagainya belum lagi prasarananya seperti harus ada polisi syariah dan sebagainya.

Tapi tidak berselang lama dari euforia keberhasilan melahirkan Piagam Jakarta itu, para tokoh Nasionalis-Muslim segera tersadar ketika pada pagi hari, tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Piagam Jakarta kembali dipersoalkan dan ini masalah yang muncul ini lebih serius karena menyangkut keutuhan bangsa dan tentu harus diselesaikan dengan hati yang besar. Padahal semua orang sudah mengetahui bahwa para tokoh Nasionalis-Muslim adalah para pejuang yang sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disebutkan bahwa sebelum UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang negara Republik Indonesia merdeka, seorang pejabat angkatan Laut Jepang menjumpai Moh. Hatta dan melaporkan bahwa orang-orang Kristen (yang sebagian besarnya berdomisili di wilayah Timur) tidak akan bergabung dengan negara Indonesia bila unsur dalam Piagam Jakarta (Percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya, termasuk syarat presiden harus seorang Muslim dibiarkan tetap menjadi dasar negara.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Anwar HarJono, *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh Ke Belakang Menatapa Masa Depan*, Jakarta, GIP, 1997, hlm.48. persoalan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta memang masih menjadi

Dan karena kecintaan mereka kepada bangsa itulah akhirnya para tokoh Islam ketika itu diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan, dengan berbesar hati dapat menerima kenyataan bahwa mereka memang harus menerima penghapusan apa yang dikenal dengan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta tersebut. Para tokoh itu, ikhlash melepas tujuh kata yang telah mereka perjuangkan dengan berdarah-darah itu. Tidak mereka hiraukan rasa capek, sekian banyak waktu yang tersita, juga tenaga, sudah berepa lama mereka meninggalkan keluarga, dan sudah berapa banyak harta yang mereka korban untuk lahirnya “tujuh kata” itu. Tapi akhirnya mereka relakan untuk dibuang hanya demi persatuan bangsa. Sebagai kompensasi kecil dari perjuangan besar yang telah mereka perbuat untuk bangsa ini, mereka hanya minta, sila pertama Pancasila itu dimasukkan unsur tawhid. Dengan demikian sila pertama Pancasila itu menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selesainya persoalan Pancasila itu bukan berarti persoalan selesai. Pemilu yang ditunggu-tunggu oleh Masyumi, karena menurut mereka, perjuangan sesungguhnya adalah di Pemilu. Masyumi begitu optimis akan memenangkan kompetisi karena berkeyakinan mayoritasnya umat Islam, khususnya organisasi Islam yang tergabung dalam Masyumi.

Tapi malangnya Masyumi, tiga tahun sebelum pemilu dilaksanakan, oragnisasi Islam tradisional dan terbesar di Indonesia, NU, memisahkan diri, atau dengan bahasa lain, keluar dari barisan Masyumi pada tahun 1952.

Keluarnya NU tentu menjadi tamparan keras bagi Masyumi. Dan akhirnya di Pemilu yang pertama diadakan itu,

---

misteri. Betapa tidak, rapat-rapat Panitia Sembilan sudah dengan komposisi yang lengkap. Ada tokoh nasionalis, dan bahkan tokoh Indonesia Timur Kristen, AA Maramis, selain para tokoh Muslim.

Masyumi hanya menempati urutan kedua, di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Soekarno.<sup>11</sup>

Dengan demikian Pemilu pertama yang berlangsung sangat demokratis itu tidak melahirkan partai mutlak tunggal. Dalam sidang Majelis Konstituante 1956-1959, perdebatan panas mengenai dasar negara pun kembali terjadi, dan hingga berlangsung hampir tiga tahun. Dianggap tidak ada solusi untuk pemecahan persoalan dasar negara itu, karena masing-masing partai memaksakan kehendaknya, dan akhir tahun 1960 Partai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno setelah satu tahun sebelumnya Soekarno, melalui Dekrit tertanggal 5 Juli 1959 membubarkan Konstituante.<sup>12</sup>

### **Islam Politik Masa Orde Baru vis a vis Negara**

Lima tahun setelah Masyumi dibubarkan, PKI melakukan pemberontakan yang terkenal dengan Gerakan 30 September 1965 itu. Buntut dari gagalnya pemberontakan PKI itu, pemerintahan pun berpindah dari tangan Soekarno kepada Soeharto. Akibat dari perpindahan kekuasaan itu PKI dan seluruh anteknya dinyatakan dilarang hidup di Indonesia.

Tampilnya Soeharto ke tampuk pimpinan negara menimbulkan asa yang besar bagi tokoh politik Islam Masyumi. Mereka yakin Partai Masyumi akan segera direhabilitasi oleh

---

<sup>11</sup>Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapat suara sebesar 8.434.653 (57 kursi) sebagai pemenang pertama. Sementara Masyumi diurutan kedua, mendapat suara 7.903.886 (57 kursi). Di bawahnya ada NU (urutan ketiga) dan PKI (keempat), masing mendapat 6.955.14 (45 kursi) dan 6.179.914 (39 kursi). Diperingkat lima, ada Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mendapat 1.091.160 (8 kursi)

<sup>12</sup> Anwar Harjono, *Perjalanan Politik*, hlm. 59



Soeharto. Tapi tidak lama kemudian, mereka segera sadar bahwa, dalam konteks politik Islam vis a vis negara, Soeharto sama saja dengan Soekarno. Walaubagaimanapun, Soeharto membolehkan umat Islam mendirikan partai Islam asal tokoh-tokoh Masyumi tidak terlibat di dalamnya. Dan setelah melewati jalan yang berliku, Partai Mulimin Indonesia (Parmusi) dapat didirikan. Parmusi yang diizinkan lahir tidaklah seperti yang diinginkan oleh para tokoh Masyumi karena pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan yang ketat. Dan karena terus meragukan kesetiaan Islam kepada Pancasila, pada tahun 1984, pemerintahan Orde Baru membuat aturan satu asas baik dalam politik atau organisasi kemasyarakatan dan akibat dari kebijakan tentu melahirkan penentangan-penentangan yang keras dari umat Islam. Pemerintahan juga bertindak refresif terhadap umat Islam karena itu banyak kebijakan-kebijakan yang tentu saja merugikan perkembangan, tidak hanya politik, tapi juga ekonomi, sosial, dan pendidikan umat Islam sehingga umat Islam benar-benar terpinggirkan dari berbagai aspek kehidupan di dalam sebuah negara yang notabene adalah mayoritas umat Islam.

Umat Islam hanya seperti buah yang berserakan di bawa arus pasang. Dapat dibayangkan umat mayoritas menjadi objek di negeri sendiri, menjadi penonton. Sebaliknya minoritas menjadi penentu. Tentu hal itu tentu merupakan sebuah kondisi yang tidak seharusnya terjadi. Dan karena umat Islam mayoritas penentangan terus terjadi sehingga pembangunan dalam berbagai aspek benar-benar terhambat. Dan karena itulah Indonesia benar-benar menjadi negara yang sangat terlambat berkembang. Padahal berbagai potensi alam begitu melimpah.

Tidak berlebihan kalau disimpulkan bahwa penyebab keterlambatan dalam berbagai sektor pembangunan adalah karena persoalan bagaimana Islam vis a vis terhadap negara. Untuk melihat ketertinggalan di Indonesia, kita dapat memban-

dingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan apalagi Singapura. Padahal kemerdekaan kedua negara tersebut lebih terakhir dibanding Indonesia.

Mari kita lihat Singapura, sebuah negara yang hanya kurang dari satu jam dari Pulau Batam (Kepulauan Riau) dalam banyak hal negara kecil ini jauh meninggalkan Indonesia. Bahkan orang Singapura sering bilang, kalau melihat Batam sekarang, sama dengan melihat Singapura di tahun 1980an yang lalu padahal Indonesia lebih dulu merdeka daripada Singapura. Lihat lagi Malaysia, negara tetangga yang hanya dua jam dari Batam. Di tahun 1970an orang-orang Malaysia banyak mendatangkan guru dari Indonesia untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka. Akan tetapi saat ini yang terjadi adalah sebaliknya. Hampir semua universitas di Malaysia, dipenuhi oleh pelajar-pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di sana. Belum lagi di bidang teknologi dan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan hidup menjadi salah satu ukurannya.<sup>13</sup>Harus diakui juga penyebab ketertinggalan itu bukanlah

---

<sup>13</sup> PDB Per Kapita Singapura dilaporkan sebesar 59,819.000 USD pada 2020. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 65,641.000 USD untuk 2019. Data Pdb Per Kapita Singapura diperbarui tahunan, dengan rata-rata 12,764.000 USD dari 1960 sampai 2020, dengan 61 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 66,664.000 USD pada 2018 dan rekor terendah sebesar 428.000 USD pada 1960. Data Pdb Per Kapita Singapura tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh Department of Statistics. Data dikategorikan dalam Global Economic Monitor World Trend Plus – Table SG.A062: GDP per Capita.

(<https://www.ceicdata.com/id/indicator/singapore/gdp-per-capita>)  
Pdb Per Kapita Malaysia dilaporkan sebesar 11,217.772 USD pada 2019. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 11,084.302 USD untuk 2018. Data Pdb Per Kapita Malaysia diperbarui tahunan, dengan rata-rata 2,196.770 USD dari 1957 sampai 2019, dengan 63 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 11,217.772 USD pada 2019 dan rekor terendah sebesar 226.979 USD pada 1961. Data Pdb Per Kapita Malaysia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data. Data dikategorikan dalam Global Economic Monitor World Trend Plus – Table MY.A002: 2015 Base: GDP by Expenditure: Current Price (Annual). (<https://www.ceicdata.com/id/indicator/malaysia/gdp-per-capita>).

satu-satunya pertentangan persolan agama dan politik itu, masih banyak unsur lain seperti korupsi. Akan tetapi faktor terpenting ketertinggalan Indonesia adalah persoalan Islam dan politik itu.

Banyak orang menyebut Indonesia beruntung dengan memiliki ilmuan selevel Nurcholish Madjid. Kehadiran Nurcholish Madjid di panggung pemikiran politik Indonesia bisa merubah peta politik dari yang selama tiga puluh tahun sebelumnya memperpentangkan konsep negara dengan Islam hingga menjadikan politik sejalan dengan Islam sehingga tidak lagi terjadi pertentangan. Dengan demikian pembangunan di Indonesia dapat berjalan seperti sekarang ini. Nurcholish Madjid dianggap sebagai tokoh yang paling berjasa menyudahi - atau paling tidak mengurangi saling berhadapan antara Islam dan negara. Semboyan *"Islam Yes, Partai Islam No*, menyatukan banyak orang Islam. Namun harus diakui begitu banyak tokoh Islam yang merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid. Akan tetapi kemaslahan umat, secara khusus, dan bangsa secara umum, agaknya jauh lebih penting. Oleh sebab itu perjalanan pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid sangat layak untuk dikaji dan dipaparkan kepada para pembaca Indonesia.

---

Bandingkan dengan pendapatan perkapita Indonesia ditahun yang sama (2020) di saat sama-sama mengalami covid 19 yang hanya menjadi US\$3.870 di tahun 2020. (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-bekerja-keras-naikkan-pendapatan-per-kapita/>)

## **BAB II**

# **ISLAM DAN POLITIK DALAM LINTASAN SEJARAH**

### **A. Hubungan Islam dan Politik Era Klasik**

Sebelum lebih jauh menganalisis pemikiran Nurcholish Madjid tentang bagaimana seharusnya Islam diposisikan terhadap negara, tentu akan menjadi penting melihat bagaimana politik Islam di masa Nabi dan para sahabat dan dengan begitu akan dapat melihat pijakan pemikiran Nurcholish Madjid, apakah landasan berpikirnya sesuai dengan fakta sejarah, dalam hal ini, Nabi dan para sahabat atau tidak. Maka di bawah ini akan dibahas beberapa hal di antaranya, politik Islam masa Nabi, dan sahabat-sahabat Khulafa Arrasyidin.

#### **1. Masa Khulafaurrasyidin**

##### **a. *Khalifah Abu Bakar***

Rasulullah wafat tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara.<sup>14</sup> Sementara dalam dua sumber ajaran Islam; al-Qur'an dan hadis juga tidak terdapat petunjuk yang jelas tentang proses suksesi. Belum lagi jasad Nabi dikuburkan, umat Islam, kaum Muhajirin dan Ansar sudah melakukan debat sengit untuk mendudukkan masing-masing tokoh mereka sebagai khalifah. Masing-masing mereka mengklaim sebagai yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Pertemuan yang diadakan di Balai Pertemuan Sa'idah itu dipadati orang Ansar dan sebagian dari kaum Muhajirin. Orang Anshor menetapkan calon dari

---

<sup>14</sup>Konsep yang penulis bahas ini adalah konsep politik Islam kaum Sunnah Wa al-Jama'ah. Lain halnya konsep politik kaum Syi'ah yang meyakini bahwa Nabi telah menetapkan pengganti yakni 'Ali bin Abi Thalib.

kelompok Madinah yakni Sa'ad bin Abi 'Ubadah sebagai khalifah dengan alasan mereka, muslim Madinah adalah orang-orang yang berjasa terhadap Islam karena merekalah yang menyelamatkan Nabi dan dakwah Nabi di saat Nabi hijrah ke Madinah. Tantangan itu mendapat sambutan Kaum Muhajirin yang juga merasa golongan yang paling berhak karena mereka, orang-orang Muhajirin adalah golongan pertama merasakan pahit manis berjuang bersama Nabi. Setelah melakukan debat yang sengit, akhirnya secara aklamasi Abu Bakar diangkat menjadi khalifah untuk menggantikan kedudukan Nabi sebagai kepala negara. Setelah pembai'atan,<sup>15</sup> Abu Bakar naik di atas mimbar dan menyampaikan pidato pelantikan di hadapan masa. Itulah pidato pertama Abu Bakar yang pertama setelah ia diangkat menjadi khalifah dan kandungan khutbah itu menerangkan sistem pemerintahan Islam. Pidato itu berbunyi:

*“Wahai semua manusia, sesungguhnya aku dipercaya menjadi pemimpin untuk kamu semua, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku melakukan kebaikan, bantulah aku, dan di saat aku melakukan kesalahan, luruskanlah aku. Kejujuran merupakan manifestasi amanah sedangkan kebohongan berarti pengkhianatan. Si lemah diantara kalian, dalam anggapanku, adalah si kuat hingga aku memberikan haknya dengan izin Allah. Dan si kuat diantara kalian adalah si lemah bagiku hingga aku mampu merampas hak orang lain darinya dengan izin Allah....Tautilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasul-Nya dan ketika aku berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kalian tidak harus lagi tunduk padaku.”<sup>16</sup>*

Dalam khutbah itu Abu Bakar dengan kapasitasnya sebagai khalifah pertama dalam Islam menegaskan hak umat Islam untuk mengawasi dan mengkritisi pemimpinnya (menganjurkan adanya oposisi yang loyal dan konstruktif) yang dipilih dan di bai'at oleh mereka sendiri. Rakyat harus mendukung

---

<sup>15</sup> Bai'at adalah persetujuan dengan melakukan janji setia dan taat

rencana dan program pemerintah, juka rencana dan program itu untuk kemaslahatan semua elemen masyarakat dan selama tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Begitupun sebaliknya, rakyat jangan hanya *nrimo*, tapi awasilah pelaksanaan program pemerin-tahan karena bisa saja pemerintah melakukan hal-hal yang merugi-kan rakyat banyak dan juga berpotensi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya. Rakyat wajib patuh kepada pemimpin yang betul-betul menjalankan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Sebalik-nya, tegakkanlah nahi mungkar ketika melihat para pemimpin tidak lagi di dalam koridor hukum yang telah ditetapkan Allah swt.

Dari isi pidato Abu Bakar di atas, jelas sekali Abu Bakar menciptakan sesuatu yang sama sekali baru dan sangat modern. Sebagaimana diungkapkan oleh Robert N. Bellah, sosiolog agama berkebangsaan Amerika terkemuka, di dalam bukunya *Beyond Blief*, dia mengungkapkan dengan sangat simpatik tentang sistem sosial masa Nabi yang kemudian diimplementasikan secara luas oleh khalifah-khalifah Nabi, kata Bellah,

*“Tidak diragukan lagi, di bawah kepemimpinan Nabi Muham-mad, Masyarakat Arab telah membuat langkah maju yang mencolok dalam hal kompleksitas soaial dan kapasitas politiknya. Ketika struktur yang terbentuk pada masa Nabi itu diperluas oleh para khalifah yang awal untuk memberikan landasan organisa-sional bagi sebuah imprium dunia, maka yang diperoleh adalah satu hal yang benar-benar modern untuk tempat dan masa itu.”<sup>17</sup>*

Ada dua alasan fundamental yang dikemukakan oleh Bellah, mengapa masyarakat Islam awal itu disebut modern (1) karena tingginya tingkat komitmen, keterlibatan, dan partisipasi dari masyarakat dan (2) dalam hal keterbukaan posisi pemim-pinnya untuk dapat dinilai kemampuannya berdasarkan landasan-landasan yang universalistik, yang disimbolkan tentang

---

<sup>17</sup>Robert N. Bellah, *Beyond Blief, Esai-Esai Tentang Agama di Dunia Modern*, (Terj.), (Jakarta: Paramadina, 2000), cet. Ke-1, h.211

upaya untuk melembagakan jabatan khalifah tidak berdasarkan garis keturunan, sekalipun di masa-masa awal terdapat sekian banyak kendala dan hambatan yang mempersulit beroperasinya prinsip-prinsip tersebut secara penuh.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, Abu Bakar tetap konsisten dengan sistem yang berlaku pada masa Nabi dan (juga konsisten) dengan pidato pertamanya ketika dibai'at. Dan karena waktu pemerintahannya yang relatif singkat (632-634 M) membuat Abu Bakar tidak bisa banyak berbuat banyak. Apalagi masa beliau juga banyak persoalan yang berat, seperti menghadapi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Itulah Abu Bakar, sahabat tercinta Rasulullah yang selalu dikenang sampai akhir dunia. Setelah masa kurang dari tiga tahun, ia jatuh sakit dan tidak lama kemudian dia wafat dalam usia 63 tahun. Dan sekali lagi umat Islam bersedih karena kehilangan putra terbaiknya yang telah mengukir sejarah keemasan dalam kehidupan sosial umat Islam, terutama kehidupan politik.

#### **b. Umar Bin Khatab**

Di tahun ke tiga Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, dia mendadak jatuh sakit. Selama lima belas hari Abu Bakar tidak dapat sholat berjamaah di masjid selama itu pula ia meminta Umar Ibn untuk menjadi imam sholat menggantikan dirinya. Makin hari sakit Abu Bakar semakin parah dan beliauupun merasakan bahwa ajalnya sudah dekat. Sementara itu kenangan tentang pertentangan di Balai Pertemuan Bani Sa'idah masih segar dalam ingatannya. Ia khawatir peristiwa di Balai Pertemuan Bani Sa'idah itu akan terulang. Dan bila itu terulang tentu akan menjadi "alarm kematian" bagi umat yang baru seumur jagung itu. Dan tentu saja tidak dikehendaknya. Menurut Abu Bakar orang yang tepat menggantikannya adalah Umar Bin

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Khatab. Kemudian beliau melakukan konsultasi tertutup dengan para sahabat senior yang kebetulan menjenguknya di rumah. Di antara para sahabat yang diajak untuk berkonsultasi adalah ‘Abdurrahman Bin ‘Auf dan ‘Usman Bin ‘Affan dari kelompok Muhajirin, serta Asid Bin Khudhair dari kelompok Anshar. Pada dasarnya semua setuju dengan ide Abu Bakar, walaupun ada di antaranya yang menyampaikan persetujuan dengan catatan. ‘Abdurrahman, misalnya, mengingatkan akan sifat ”keras” Umar. Keberatan itu dijawab oleh Abu Bakar bahwa ‘Umar yang bersikap keras selama ini karena melihat sifat Khalifahnya (Abu Bakar) yang biasanya lunak.<sup>19</sup> Demi kemaslahatan umat Abu Bakar meminta agar pembicaraan di antara mereka tidak bocor.<sup>20</sup>

Abu Bakar memanggil ‘Usman Bin ‘Affan dan kemudian Abu Bakar meminta ‘Usman untuk mencatat wasiatnya. Wasiatnya berbunyi,

*“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Inilah yang divasiatkan Abu Bakar kepada kaum muslimin. Amma ba’du, sesungguhnya aku telah menunjuk untuk kalian ‘Umar Bin Khattab sebagai Khalifah penggantikmu demi kebaikan kalian.” Di saat hari wasiat ‘Umar dibacakan di hadapan massa, Abu Bakar memandang khalayak ramai seraya berkata, “Apakah kalian rela dengan orang yang aku tunjuk ini sebagai khalifah bagi kalian? Demi Allah, sesungguhnya aku tidak melakukan ini tanpa urun rembug dan aku juga tidak menunjuk kerabat dan sesungguhnya aku telah menunjuk ‘Umar Bin Khattab sebagai penggantikmu untuk kalian. Maka dengar dan taatilah dia. Mereka menyambut serempak, ‘Kami dengar dan kami patuhi.”<sup>21</sup>*

---

<sup>19</sup> Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, hlm.24

<sup>20</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: GIP, 1996), cet. Ke-1. h.24.

<sup>21</sup> M. Dhiyauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: GIP, 1999), cet. ke I



Dengan demikian, ‘Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui permusyawaratan dan ditetapkan secara aklamasi. Dan sejarah tidak pernah mencatat adanya oposisi destruktif yang diakibatkan oleh ketidaksetujuan terhadap pengangkatan ‘Umar sebagai khalifah dan begitupun selama ‘Umar berkuasa.<sup>22</sup> Sejarah juga mencatat bahwa bahwa ‘Umar sangat tegas dalam hal-hal yang menurutnya bertentangan dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum agama. ‘Umar tidak segan-segan menindak siapa pun yang melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian supremasi hukum dapat ditegakkan. Dan ‘Umar pun dikenal sebagai orang yang sangat lunak ketika dia berhadapan dengan hal-hal yang menghendaki demikian. ‘Umar tidak segan-segan mengangkat gandum dengan tangannya sendiri untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dan miskin. Dengan kenyataan itu benarlah prediksi Abu Bakar ketika menjawab keberatan “‘Abdurrahman bin ‘Auf terhadap usulannya untuk mengangkat ‘Umar sebagai khalifah. Di era ‘Umarlah wilayah kekuasaan Islam mulai berkembang pesat. Syam (Suriah), Mesir, dan Palestina dapat dikuasai dan menjadi daerah administratif Islam. Sejarah juga membuktikan bahwa khalifah ‘Umar sangat dicintai oleh rakyatnya. ‘Umar menjadi khalifah selama 10 tahun (13-23 H/ 634-644 M). ‘Umar meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari akibat tikaman di punggung oleh Abu Lu’Lu’ah (Fairus) ketika sedang salat subuh di Masjid Nabawi.

### ***c. ‘Usman Bin Affan***

‘Usman bin ‘Affan menjadi khalifah melalui proses yang berbeda dari pendahulunya, Abu Bakar dan ‘Umar bin Khatab. Seperti tercatat dalam sejarah, pada pertengahan tahun kesebelas, khalifah ‘Umar menderita luka-luka akibat tikaman seorang Kristen dari Persia, bernama Abu Lu, luah. Kondisi

---

<sup>22</sup> *Ibid*

‘Umar semakin hari semakin parah. Kondisi kesehatan ‘Umar itu membuat para sahabat khawatir lagi-lagi kalau belum jelas siapa penggantinya, akan terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu mereka (sahabat senior) mendatangi ‘Umar dengan alasan orang-orang yang menurutnya pantas untuk menjadi khalifah sudah tidak ada lagi. Dan ‘Umar sempat marah ketika tokoh-tokoh tersebut mengusulkan agar ‘Umar menunjuk penggantinya dari salah seorang putranya sendiri, yakni ‘Abdullah bin ‘Umar. Dia menolak keras usulan itu seraya mengatakan “cukuplah seorang dari keluarga ‘Umar yang mendapat kehormatan ini.” Akhirnya dengan rasa kecewa mereka meninggalkan rumah kediaman ‘Umar. Tapi karena bahaya perpecahan semakin jelas, hari esoknya mereka kembali lagi mengunjungi ‘Umar dan mendesak ‘Umar untuk menunjuk penggantinya.

Akhirnya ‘Umar menyerah, walaupun tidak langsung menunjuk pengganti. Dia hanya memilih enam sahabat senior dan keenam sahabat inilah nantinya akan memilih seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah. Enam orang yang ditunjuk ‘Umar bin Khattab itu adalah ‘Ali bin Abi Thalib, ‘Usman bin ‘Affan, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Sa’ad bin Abi Waqas, Zubair Bin ‘Awwam, dan Thalhah bin ‘Ubaidillah serta ‘Abdullah bin ‘Umar, putranya, tapi tanpa hak suara.<sup>23</sup>

Setelah ‘Umar meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 1 Muharram tahun 23 Hijriyah, sahabat-sahabat yang telah ditunjuk oleh ‘Umar mengadakan sidang. Dari sidang itu disepakati mereka akan menyerahkan wewenang kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf untuk mencari siapakah orang yang dikehendaki rakyat untuk menjadi pemimpin mereka. Setelah terus-menerus melakukan tugas selama tiga hari, ‘Abdurrahman mendapati secara mayoritas rakyat memilih dua dari enam orang anggota majlis di atas yakni ‘Ali Bin Abi Thalib dan ‘Usman bin

---

<sup>23</sup> Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara....*, hlm. 25

‘Affan. Dalam pertemuan berikutnya dengan rekan-rekannya sesama anggota majlis, ‘Abdurrahman menanyakan kepada ‘Ali “Kalau bukan dia (‘Ali siapakah kiranya yang pantas menjadi khalifah. ‘Ali menjawab, ‘Usman. Pertanyaan yang sama diajukan pula kepada Zubair dan Sa’ad, mereka menjawab, ‘Usman. Terakhir pertanyaan yang sama diajukan kepada ‘Usman. ‘Usman menjawab ‘Ali lah orang yang pantas. Dengan demikian jelaslah hanya dua orang calon untuk menduduki jabatan khalifah, yakni ‘Ali bin Abi Thalib dan ‘Usman bin ‘Affan.<sup>24</sup>

Untuk melaksanakan pemilihan dan sekaligus bai’at kepada calon khalifah terpilih, ‘Abdurrahman, selaku formatur tunggal, meminta kaum Muslimin untuk berkumpul di Masjid Nabawi. Kemudian kepada calon satu, ‘Ali, diajukan pertanyaan, “Apakah anda sanggup melaksanakan tugas kekhilafahan berdasarkan al-Qur’an dan Hadis, serta pola-pola yang di terapkan oleh khalifah pendahulumu?”

‘Ali menjawab, saya akan berbuat sepengetahuan dan sekemampuan saya.” Kemudian pertanyaan yang sma ditanyakan kepada “Usman. ‘Usman menjawab “ya, saya sanggup”. Berdasarkan jawaban dari kedua calon khalifah itu, akhirnya ‘Abdurrahman memilih dan menetapkan ‘Usman lah orang yang pantas menjadi pemimpin umat Islam waktu itu. Penulis tidak dapat menemukan alasan lain yang membuat ‘Usman ditetapkan oleh ‘Abdurrahman sebagai khalifah karena ‘Usman menjawab secara tegas mengatakan sanggup. Karena selain bahwa ‘Usman sudah lanjut usia, ‘Usman juga adalah seorang yang tidak bisa bertindak tegas. Padahal ‘Ali, selain usia yang memang masih muda, Nabi juga selalu memujinya sebagai orang yang sangat berilmu dan selalu bijaksana. Jelas ‘Ali

---

<sup>24</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: PT, Bina Ilmu, 1995). Cet. Ke I, h. 76. Lihat juga Dhiyauddin Rais, h. 27.

kecewa dengan metode yang dipakai oleh ‘Abdurrahman. Namun ‘Ali tidak bisa berbuat apa-apa, karena otoritas itu memang telah diserahkan kepada ‘Abdurrahman sehingga ‘Ali sempat melemparkan tuduhan bahwa ‘Abdurrahman melakukan kolusi bersama ‘Usman dengan alasan bahwa ‘Usman juga adalah keluarga ‘Abdurrahman. Dan tentu bila ‘Usman yang berkuasa, ‘Abdurrahman juga akan menikmati kekuatan itu.<sup>25</sup>

Pada awal pemerintahan, ‘Usman bin ‘Affan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan janji yang dia ucapkan ketika dia ditanya tentang kesanggupannya menjadi khalifah dan sesuai juga dengan isi pidato yang dia sampaikan ketika terpilih menjadi khalifah. Ia hampir seluruhnya mengikuti pola kebijaksanaan yang ditempuh pendahulunya. ‘Umar bin Khattab. Tidak ada mutasi yang berarti bagi pejabat pusat dan daerah. Tapi karena perubahan generasi dari angkatan para sahabat ke putra-putra mereka, mulailah kebijaksanaan ‘Usman berubah mengikuti tuntutan generasi muda dari kalangan keluarganya sendiri. Bukan hanya memberikan jabatan-jabatan hanya kepada keluarganya sendiri, tetapi juga dalam menggunakan keuangan negara tidak untuk kepentingan masyarakat secara luas. Kebijaksanaan semacam ini menimbulkan protes dan menuai banyak kecaman, baik dari kalangan sahabat senior maupun dari generasi muda yang bukan keluarga dekat khalifah.<sup>26</sup> Ditambah oleh kenyataan tidak adanya kontrol dari anggota Majlis Syura (orang-orang yang ditunjuk ‘Umar untuk memilih khalifah pasca dirinya) karena mereka selalu berkunjung ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan dan selalu menjadi wilayah Islam, Kebijaksanaan ‘Usman bertambah buruk. Sementara para familinya senantiasa turut menentukan setiap keputusan dan kebijaksanaan khalifah. Melihat kondisi yang semakin tidak menentu, timbullah kelompok pemberontak yang berkumpul di kota Madinah.

---

<sup>25</sup> *Ibid. h. 168.*

<sup>26</sup> Abdul Qadir Djailani, *Negara Ideal...* h, 78

Kehadiran mereka di Ibu kota pada awal hanya ingin mengajukan tuntutan agar khalifah memecat para pejabat yang menurut mereka tidak becus. Karena para pejabat yang dituntut itu adalah keluarga dekat khalifah, maka tuntutan mereka ditolak. Suasana kacau tidak bisa dikendalikan lagi dan pemberontak mengepung rumah kediaman khalifah, walaupun pasukan keamanan pemerintah memberikan perlawanan, namun tidak cukup berarti karena pasukan pemberontak lebih banyak hingga akhirnya pemberontak berhasil membunuh khalifah ‘Usman bin Affan<sup>27</sup>

#### **d. *Ali Bin Abi Thalib***

Setelah para pemberontak berhasil membunuh khalifah ‘Usman, mereka dengan dipimpin oleh ‘Abdullah bin Saba, menuju rumah ‘Ali dan diikuti oleh sekian banyak orang. Mereka mendesak ‘Ali agar bersedia diangkat menjadi khalifah. Tapi ‘Ali menolak, karena ‘Ali menyadari bahwa yang berhak mengangkatnya menjadi khalifah adalah anggota majlis yang dulu memilih “Usman dan orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Sejenak kemudian, muncullah ketiga tokoh senior (ahli syuro) itu<sup>28</sup> dan berbai’at kepada ‘Ali yang kemudian diikuti oleh semua jamaah yang hadir.

Pembai’atan ‘Ali itu mendapat tantangan dari keluarga ‘Usman, terutama Muawwiyah Bin Abi Sufyan. Menurut Muawwiyah, selain bahwa pembai’atan terhadap ‘Ali tidak dihadiri oleh semua anggota majlis syura, juga karena wilayah Islam semakin luas, maka yang berhak menentukan jabatan khalifah, tidak hanya mereka yang pada di Madinah, tapi juga menjadi hak mereka yang berada di wilayah-wilayah yang baru yang menjadi wilayah Islam. Pendapat Muawwiyah bin Abi Sufyan ini didukung oleh sejumlah sahabat di Madinah yang

---

<sup>27</sup> Ibid. h. 78-79

<sup>28</sup> Munawir Syazali....

kemudian bergabung dengannya Syiria. Pertentangan terus berlanjut. Dan sebenarnya Muawwiyah mau menerima 'Ali sebagai khalifah asal 'Ali mengadili orang yang telah membunuh 'Usman dengan secepatnya. Namun 'Ali kurang merespon tuntutan itu, hingga kemudian fakta sejarah menyebutkan terjadinya perang sipil antara dua kelompok umat Islam, kelompok 'Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah dan kelompok Muawwiyah bin Abi Sufyan. Perang itu dimenangkan oleh kelompok 'Ali, tapi Muawwiyah menggunakan kelihaiannya dan kelicikannya meminta 'Ali untuk berdamai. Dengan senang hati 'Ali menerima uluran perdamaian itu, namun permintaan Muawwiyah berdamai tidak tulus. Akhirnya kemudian sejarah menyebutkan dengan tipu muslihat (Peristiwa Arbitase) Muawwiyah berhasil merampas kekhalifahan dari 'Ali, sampai kemudian 'Ali terbunuh oleh orang-orang Khawarij (Kelompok yang keluar dari pasukan 'Ali karena mereka menganggap Ali telah kafir karena telah menerima ajakan berdamai oleh Muawwiyah sementara Muawwiyah sendiri luput dari pembunuhan). Kemudian umat Islam yang pro 'Ali, mengangkat Hasan, anak laki-laki 'Ali sebagai Khalifah, namun dalam waktu enam bulan, tepatnya di tahun 40 H, Hasan menyerahkan tahta kekhalifahan itu kepada Muawwiyah karena alasan persatuan. Kejadian itu dan selanjutnya sangat mewarnai perjalanan ketatanegaraan Islam pada masa-masa berikutnya.

## **2. Era Pasca Khulafaur Rashidin**

Dengan wafatnya 'Ali sebagai Khalifah ke-4: maka berakhirilah suatu era, sekali lagi menurut Robert N. Bellah, sebagai era yang sangat modern di mana rakyat dapat berpartisipasi dalam penentuan seorang pemimpin (*khalifah*) dan era di mana kekuasaan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang apalagi oleh satu keluarga. Maka era yang modern itu digantikan sistem yang sudah mentradisi di negara-negara seperti Persia dan

Romawi yaitu sistem monarkhi. Muawwiyah bin Abu Sufyan mendapatkan kedudukan sebagai khalifah tidak lagi melalui majlis syura atau dengan musyawarah dan dibai'at dengan sukarelah oleh rakyat, tetapi di dapatkan dengan cara manipulatif. Dan menjelang akhir hayatnya ia menunjuk Yazid, putranya sendiri, sebagai penggantinya. Dan itulah titik awal dari lahirnya sistem monarkhi atau kerajaan yakni pengisian jabatan kepala negara ditentukan atas dasar keturunan dari situ pulalah dibangun dinasti Ummawiyah.<sup>29</sup>

Kehidupan kenegaraan sejak saat itu dan masa selanjutnya kiranya tidak banyak yang dapat disinggung karena dari dinasti muawwiyah dan dinasti-dinasti selanjutnya, Abbasiyah, Fatimiyah, Syafawiyah dan lain-lain, sampai Usmaniyyah di Turki hubungan Islam dan negara (politik) tidak banyak berubah kalau tidak dapat disebut tidak ada perubahan sama sekali dari sistem monarkhi yang pertama kali oleh Muawwiyah ketika dia (muawwiyah) merampas-nya dari 'Ali.

Esensi khalifah Islamiyah itu, sesungguhnya, sejak terbunuhnya 'Ali, walaupun pernah juga muncul dari salah seorang khalifah Muawwiyah 'Umar Bin Abdul Aziz, yang sering disebut sebagai *khalifah rasyidah* yang kelima dalam waktu yang relatif singkat hanya kurang lebih tiga tahun (99-101 H) sampai waktu dihapuskannya khilafah Islamiyah pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Attaturk di Turki, sudah tidak ada lagi, dalam artian, khalifah dalam sejarah pemerintahan Islam, baik dinasti Umawiyah, Abbasiyyah, sampai ke dinasti 'Usmaniyyah tidak lagi Islami dengan indikasi otoritarianisme dan diktatorisme. Indikasi yang juga mewarnai sistem khalifah di atas, tidak adanya pembatas kekuasaan bagi seorang khalifah. Sebaliknya kekuasaan seorang khalifah sangat absolut, sehingga institusi pemerintahan dianggap sakral dan mengalami kemacetan. Padahal seorang khalifah hanya-lah sebagai wakil rakyat

---

<sup>29</sup> *Ibid. h. 34*

di muka bumi dan semua kebijaksanaannya akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat maupun zat yang memberikannya kekuasaan.

### 3. Keruntuhan Khilafah Islamiyah

Lembaga khalifah Islamiyyah di Turki adalah lembaga kekhalfahan yang terakhir dalam sejarah kekhalfahan Islam. Kekhalifahan ini didirikan oleh keluarga ‘Usman pada kira-kira tahun 1300 M, dan ‘Usman sebagai rajanya yang bergelar sultan dan sekaligus sebagai khalifah.<sup>30</sup> Turki ‘Usmani mengalami masa keemasan ketika kendali khalifah dipegang oleh ‘Usman sampai era pemerintahan sultan Sulaiman al-Qanuni (1566). Dalam kurun waktu dua ratus tahun lebih itu mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan dengan sangat mengagumkan. Wilayah-wilayah kekuasaan Turki ‘Usmani membentang luas mencakup Eropa, Arab, Mesir, dan Afrika.

Namun setelah melewati tahapan ini Turki ‘Usmani mulai mengalami kemunduran, meskipun tidak secara langsung. Sultan Sulaiman digantikan oleh Sultan Salim II. Di masa Salim, satu demi satu wilayah administratif Turki direbut oleh tentara-tentara musuh dan puncaknya ketika Turki bergabung dengan Jerman pada Perang Dunia I di mana Turki ‘Usmani dan Jerman mengalami kekalahan.

Namun kekalahan yang sesungguhnya dialami Turki ketika pada tahun 1918 ketika sekutu Eropa berhasil mengalahkan sekutu dekat Turki, Jerman dalam perang Dunia I. Inggris merebut Palestina, Siria dan Irak. Sementara negara-negara sekutunya merebut Istambul dan sekitarnya.<sup>31</sup> Dengan kekalahan itu kabinet Turki Muda melarikan diri, Talat Pasya,

---

<sup>30</sup>Syafiq A. Muhgni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. Ke-1, h. 53

<sup>31</sup>Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta. Grafindo Persada, 1999), bagian ketiga, h. 71



Enver Pasya, dan Jamal Pasha melarikan diri ke Eropa.<sup>32</sup> Sementara perdana Menteri baru, Izzet Pasya mencari perdamaian dengan pihak yang menang. Dalam suasana tidak menentu seperti itulah muncul Mustafa Kemal,<sup>33</sup> seorang pemimpin Turki baru yang menyelamatkan kerajaan Usmani dari kehancuran total bangsa Turki dari penjajahan Eropa.<sup>34</sup> Mustafa kemudian menyusun program kemerdekaan bangsanya.

Walaupun Mustafa dapat mempertahankan Turki dari kehancuran total, tapi dia tidak bisa mengusir sekutu dari negerinya. Kekalahan Turki dan dikuasanya Istanbul oleh sekutu sangat berpengaruh pada pemerintahan Sultan. Mustafa menilai kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di Istanbul banyak yang bertentangan dengan kepentingan nasional Turki, karena pemerintahan tidak lagi independen tapi sudah di stir oleh sekutu. Oleh karena itu Mustafa melihat perlunya pemerintahan tandingan di Anatolia<sup>35</sup>. Mustafa dan teman-temannya segera mengeluarkan resolusi yang menekankan tekad rakyat Turki untuk berjuang demi kepentingan nasional Turki. Kongres pertama diadakan di Erzurum dan kemudian diikuti oleh kongres di Sivas dan di sini diputuskan bahwa Turki harus bebas dan merdeka. Selanjutnya dibentuk Komite Perwakilan Rakyat dan Mustafa sebagai ketuanya. Atas usaha Mustafa dan kawan-kawannya Majelis Nasional Agung dapat dibentuk pada tahun 1920. Dalam sidang di Ankara, ia kemudian dipilih sebagai ketua. Keputusan yang dilahirkan dari sidang itu antara lain:

1. Kekuasaan tertinggi terletak di tangan Turki.
2. Majelis Nasional Agung merupakan perwakilan rakyat tertinggi.

---

<sup>32</sup>H.A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme Turki Modern* (Jakarta: Djambatan, 1984)

<sup>33</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1995) cet. Ke-9 h. 42

<sup>34</sup> Gelar yang diberikan kepadanya sebagai Bapak Turki

<sup>35</sup> Harun Nasution, *Ibid.* h. 46

3. Majelis Nasional Agung bertugas sebagai badan Legislatif dan Eksekutif.
4. Majelis negara yang anggotanya dipilih dari majlis Nasional Agung akan menjalankan tugas pemerintah.
5. Ketua Majelis Nasional Agung merangkap jabatan Ketua Majelis Negara<sup>36</sup>.

Lebih lanjut Mustafa menjelaskan kepada anggota Dewan Nasional Agung bahwa pemerintahan Nasional di dasarnya berdasarkan kepada prinsip pokok populisme (kerakyatan), yang berarti bahwa kedaulatan dan semua kekuatan administrasi harus langsung diberikan dan dikontrol oleh rakyat. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah hapusnya kesultanan dan kekhalifahan.<sup>37</sup>

Akhirnya kesultanan dihapuskan pada tanggal 1 November 1923, dengan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Nasional Agung, setelah melalui debat yang panjang.<sup>38</sup> Sementara kekhalifahan masih tetap eksis, tapi jabatan ini hanya simbolis, dan tidak punya wewenang dalam hal pengaturan pemerintahan, dengan kata lain khalifah tetap merupakan jabatan spiritual, tanpa mempunyai kekuasaan politik.<sup>39</sup>

Di samping perjuangan Mustafa mereformasi sistem sosial di Turki, dia juga berusaha mengusir sekutu yang selama ini bercokol di bumi Turki mengendalikan jalannya pemerintahan yang dijabat khalifah. Atas kegigihannya bersama Majelis Nasional Agung (MNA), perjanjian Lausanne ditandatangani oleh MNA dan sekutu. Tentara sekutu meninggalkan Istanbul pada 2 Oktober 1923 dan empat hari kemudian tentara Turki memasuki kota. Pada tanggal 23 Juli 1923 pemerintahan baru ini secara defacto mendapat pengakuan dunia

---

<sup>36</sup> Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1998) cet. Ke I, h. 126

<sup>37</sup> H. Mukti Ali, h 82

<sup>38</sup> *Ibid*,

<sup>39</sup> Mukti Ali, *Ibid*, h 83

internasional.<sup>40</sup> Dengan dukungan luas dari rakyat Turki, Mustafa dipilih dan dilantik sebagai Presiden Pertama Turki dan tanggal 29 Oktober 1923, Turki diproklamasikan sebagai negara Republik.<sup>41</sup> Setelah membubarkan kesultanan pada 1923, Kaum Kemalis bermain-main dengan gagasan untuk mempertahankan khalifah sebagai seorang pemimpin simbolis. Namun ambisi Khalifah Abdul Majid, didukung oleh lawan-lawan politik Mustafa, memaksa pemerintah untuk bertindak cepat, dan akhirnya kekhalfahan dibubarkan pada 3 Maret 1924.<sup>42</sup> Melalui undang-undang yang dikeluarkan oleh Majelis Nasional Agung yang berisi:

1. Menghapus kekhalfahan
2. Menurunkan khalifah dan mengasingkannya bersama keluarganya
3. Menghapus kementerian syariah dan Awqaf
4. Menyatukan sistem pendidikan

Abdul Qadim Zallum, menggarisbawahi penghapusan kekhalfahan, bukanlah ide Mustafa semata, tapi konspirasi di pihak Sekutu, terutama Inggris. Turki juga dipaksa menandatangani beberapa butir kesepakatan dengan Sekutu terkait masa depan pemerintahannya di dalam perjanjian Lausane pada 22 November 1922. Salah satu negara Sekutu, Inggris, melalui delegasinya, Luard Carzon yang juga Menteri Luar Negeri Inggris, menetapkan empat syarat:

1. Penghapusan kekhalfahan secara total.
2. Mengusiran kekhalfahan sampai keluar batas-batas negara
3. Penyitaan kekayaan khalifah
4. Pernyataan sekularisasi negara

---

<sup>40</sup> Harun Nasution, , 147

<sup>41</sup> H. Mukti Ali,....

<sup>42</sup> Jhon. L. Esposito, *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001), Julid 6, h.64

Ismat Pasya, sebagai delegasi pemerintahan Turki, sempat kaget dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Inggris, dan karenanya ia pun belum dapat menandatangani syarat-syarat yang ditetapkan Inggris itu. Dengan kata lain, perundingan itu gagal. Mustafa sempat marah karena kegagalan Ismat. Menurutnya isi perjanjian itu sudah benar. Tapi Mustafa tidak putus asa. Selanjutnya ia yang mengkampanyekan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Inggris. Kemudian perdebatan sengit pun tidak bisa dihindari sampai pada teror fisik. Tapi akhir dari pertikaian itu semua, MNA menyetujui penghapusan khalifah pada tanggal 3 Maret 1924. Dengan demikian Mustafa berhasil memenuhi keempat syarat yang ditetapkan oleh Inggris. Pada tanggal 23 April, perundingan dimulai pada tanggal 2 Maret 1924, perjanjian pun diratifikasi.<sup>43</sup>

Sejak saat itu lembaga khalifah yang menjadi kebanggaan umat Islam sedunia itu berakhir. Dan seiring penghapusan lembaga khalifah di Turki, pengadilan Syari'ah pun juga dihapuskan pada bulan yang sama, diganti dengan hukum sipil Swis pada 17 Januari 1926. Selanjutnya Majelis memutuskan untuk menghilangkan kalimat "Agama Negara Turki adalah Islam" dari pasal 2 konstitusi negara.<sup>44</sup> Penggunaan abjad Latin, menggantikan abjad Arab dan pemasukan prinsip sekularisme dalam konstitusi Turki.<sup>45</sup>

## **B. Pemikiran Kenegaraan Umat Islam Indonesia**

### **1. Paradigma Integral: Konsep M. Natsir**

Untuk melacak pandangan M. Natsir tentang Islam dalam hubungannya dengan negara, menurut Kamaruzzaman, paling tidak ada dua faktor yang melatarbelakanginya; eksternal dan

---

<sup>43</sup>Abdul Qadim ZAllum, *Konspirasi Barat meruntuhkan Khalifah Islamiyah* (Jatim: Al-Izzah, 1422h), h. 177-184

<sup>44</sup> Jhon L, *Esposito Ensiklopedi*,

<sup>45</sup> Harun Nasution et. Al.(peny.) *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1985), Edisi I, h. 225-226

internal. Faktor eksternal adalah merupakan tanggapan M. Natsir terhadap sekularisasi yang sedang terjadi di Turki yang sedikit banyak mempengaruhi pemikiran Soekarno sebagai lawan debat M. Natsir. Selain itu, pandangan Natsir bahwa Pakistan telah menjadi Republik Islam yang pada gilirannya ia ingin memposisikan bahwa Indonesia juga seperti itu.

Faktor kedua, adalah faktor internal. Bahwa M. Natsir adalah seorang pembaharu.<sup>46</sup> Pemikiran pembaharuannya itu kemudian bertemu dengan bergeliatnya pembaharuan baik di Indonesia sendiri maupun Timur Tengah, khususnya tentang perlunya pemikiran kenegaraan dalam Islam. Apalagi kondisi Indonesia memang belum merdeka dan demikian M. Natsir benar-benar memainkan peran penting dengan memberikan sumbangan pikiran tentang konstruk dan dasar negara yang akan dibangun.

Hemat penulis, faktor yang paling dominan yang melatarbelakangi pemikiran Natsir tentang negara di samping faktor-faktor yang disebutkan di atas tadi adalah keyakinan M. Natsir akan ajaran al-Qur'an yang meminjam bahasa Bahtiar Efendy "hadir di mana-mana" dalam arti semua aspek kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari tuntutan baik itu bersifat kemestian (wajib), anjuran (sunnat), kebolehan (mubah) atau sebaliknya, larangan (haram). Di pandang dari sudut bahwa Islam itu "Syamil" (mencakupi) tentu persoalan kenegaraan pun tentu termasuk di dalamnya. Apalagi secara ril bahwa Islam adalah agama yang di anut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Faktor-faktor inilah kita jadikan sebagai landasan pijak untuk melacak pemikiran M. Natsir tentang negara.

M. Natsir secara tegas, dalam pidatonya tentang "Islam Sebagai Dasar Negara" menyatakan yakni kehendak kami, (saya dan fraksi Masyumi) sebagaimana yang sudah diketahui kita

---

<sup>46</sup> M. Natsir adalah salah seorang Muslim modernis yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

semua, supaya Negara Republik Indonesia kita ini berdasarkan Islam, “Negara Demokrasi Berdasarkan Islam.”<sup>47</sup>

Dan lebih tegas lagi ketika dia menyatakan hanya dua alternatif sebagai dasar negara, yaitu; pertama, sekularisme dan kedua, agama (Islam). Dengan kata lain, Indonesia pun akan mendasari dirinya dengan salah satu dari keduanya. Karena itu tidak disangkal lagi, M. Natsir adalah tokoh nasionalis-Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara.

Alasan M. Natsir menginginkan Islam sebagai dasar negara antara lain; seperti banyak umat Islam, M. Natsir percaya akan watak holistik Islam. Ia, kata Bahtiar Efendy,<sup>48</sup> percaya bahwa Islam tidak hanya terdiri dari praktik ibadah, melainkan juga prinsip-prinsip umum yang relevan untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Lebih lanjut M. Natsir berpandangan bahwa Islam berbeda dari agama-agama lain, Islam mengandung peraturan-peraturan atau hukum-hukum perdata dan hukum-hukum pidana dan untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut tentu memerlukan lembaga yang dengan kekuasaannya dapat menjamin berlakunya hukum-hukum itu. Oleh Karena itu adanya negara dan pemerintahan adalah suatu keharusan. Bagi M. Natsir, negara bukanlah tujuan, tapi hanya sebagai alat untuk melaksanakan hukum-hukum Ilahi yang tanpa adanya negara dan pemerintahan, mustahil hukum-hukum itu bisa dilaksanakan. Mengenai bentuk negara atau sistem pemerintahan, Islam tidak mewajibkan berbentuk ini atau itu. Hal itu merupakan kebebasan umat Islam untuk memilih mana yang terbaik dan sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>49</sup> Pada prinsip ini M. Natsir sependapat dengan ‘Ali

---

<sup>47</sup> M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, 9Jakarta: Media Da’wah, 2001) h, 200

<sup>48</sup> Bahtiar Efendy, *Islam Negara....* (Jakarta; Paramadina, 1998),h, 79

<sup>49</sup> Untuk lebih jelas dapat dilihat, Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, h.193

‘Abd. Al Raziq.<sup>50</sup> Natsir juga membenarkan bahwa Islam itu adalah agama yang demokratis. Namun demokrasi pada Islam tidak sama atau malah berbeda prinsip dengan demokrasi ala barat. Demokrasi Islam dalam bentuk musyawarah dan mufakat hanya dibenarkan dalam hal di mana agama (al-Qur’an dan Hadis) belum menjelaskan tentang suatu masalah secara rinci, seperti masalah *mu’amalah* (intraksi sosial dalam masyarakat, termasuk di dalamnya bentuk negara). Tapi dalam hal-hal yang sudah jelas (*qath’i*) nasnya, seperti keharaman judi, haramnya zina, juga masalah-masalah ‘aqidah dan akhlak adalah masalah-masalah yang sudah dijelaskan secara rinci oleh Allah. Jadi dalam hal yang sudah jelas nasnya tidak ada tempat bagi manusia untuk memusyawarahkannya dan membuat kesepakatan kembali tentang hukum-hukum yang sudah pasti itu. Islam tidak demokrasi 100% bukan pula otokrasi 100%. Islam ya, itu Islam.<sup>51</sup> M. Natsir menjamin bahwa dalam satu negara yang berdasarkan Islam, umat dari agama-agama lain akan mendapatkan kemerdekaan beragama dengan luas.

## 2. Paradigma simbiotik: Konsep Amien Rais

Pandangan Amien Rais tentang hubungan agama (Islam) dan negara terungkap jelas dalam sebuah wawancara oleh majalah Panji Masyarakat no. 379 tahun 1982. Dalam wawancara itu Amien mengatakan, “*Islamic State*” atau “Negara Islam”, saya kira tidak ada dalam al-Qur’an, maupun dalam al-Sunnah. Oleh karena itu tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan negara Islam....”<sup>52</sup> Kata Amien, Islam tidak pernah menentukan bentuk negara bagi kaum muslimin. Bagi Islam,

---

<sup>50</sup>M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001), h.132

<sup>51</sup> Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara....*,

<sup>52</sup> Majalah Panji Masyarakat, no. 379/1982, juga bisa dilihat dalam beberapa buku antara lain : Tidak ada negara Islam, Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid-M. Roem, (Jakarta: Djambatan 1997,) h. xxii

masih kata Amien, yang lebih penting adalah substansi atau isi. Mengenai substansi atau isi dari sebuah negara yang melaksanakan ajaran Islam menurutnya adalah suatu negara yang menciptakan masyarakat yang egalitarian, yang para pemimpinnya berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan senantiasa mengeleminasi, setidak-tidaknya meminimalisasi eksploitasi manusia atas manusia lainnya dalam segala bentuk dan manifestasinya.<sup>53</sup>

Dalam buku *Melawan Arus*, Muhammad Najib menuliskan refleksi pemikiran Amien tentang pentingnya substansi daripada formalitas (label kosong). Kata Amien, “jadi saya setuju bahwa pengejawantahan nilai-nilai Islam lebih penting daripada mewujudkannya dalam bentuk institusional... Hal pertama yang disuruh Allah swt untuk ditegakkan adalah keadilan, baru kemudian kebajikan, kemudian ihsan, baru kemudian menghindari kezaliman.”<sup>54</sup>

Mengenai keraguan-raguan orang dapatkah Islam menerima Pancasila? Dengan tegas dan berhati-hati Amien menjawab, “dapat” selama Pancasila itu dimengerti secara wajar dan benar. Karena tidak ada satupun nilai-nilai Pancasila yang tidak sejalan dengan agama Islam. Akan tetapi jika kemudian Pancasila itu ditafsirkan terlalu jauh dan dibumbui pandangan yang aneh-aneh, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pancasila itu sendiri seperti ketika ia dilahirkan, maka masalahnya memang dapat menjadi lain.<sup>55</sup>

### 3. Paradigma Sekuler: Konsep Soekarno

Kategori ketiga dari fenomena pemikiran (yang populer) tentang hubungan Islam dan negara adalah fenomena sekuler. Peristiwa sekularisasi yang sangat menghebohkan di dunia Islam

---

<sup>53</sup>Tidak Ada Negara Islam, *Surat-Surat Politik...*Ibid,h.17

<sup>54</sup>Muhammad Najib, *Melawan Arus, Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais*, (PT. Serambi Ilmu Semesta, 1999), cet. Ke-1 h. 69

<sup>55</sup> Firdaus Syam, h. 148-149



adalah ketika Mustafa Kemal Atatürk memberlakukan sekularisme di Turki pada tahun 1924. Hampir sama gemparnya dengan Mustafa Kemal adalah ketika ‘Ali ‘Abd al- Raziq<sup>56</sup> menerbitkan bukunya *al-Islam wa Ushulu Al-Hukmi* (Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan) pada tahun 1925 yang berisi penolakan tegas terhadap doktrin yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus Tuhan ke dunia dengan membawa misi ganda (*double mission*, dunia juga akhirat).<sup>57</sup> Dalam arti Nabi Muhammad diutus ke dunia hanya membawa risalah kenabian tanpa ada sangkut pautnya dengan kehidupan temporal (negara).

Dalam konteks Indonesia, agaknya Soekarno lah, sekalipun seorang Muslim, yang dengan lantang menyuarakan pemisahan agama dan Negara. Hal itulah yang menyebabkan banyak orang menyebutnya sebagai sekuler. Masalah Soekarno, apakah ia sekuler, semi sekuler, atau tidak sama sekali, akan penulis uraikan pada bagian akhir dari tulisan ini.

Argumen Soekarno dalam mengemukakan pendapatnya bahwa agama (Islam) harus dipisah dari negara karena Indonesia dari sudut populasi bukanlah negara yang dihuni 100% Muslim. Tidak bisa dipungkiri, bila Islam dijadikan Dasar Negara, tentu hak warga negara yang tidak Islam, akan banyak terjadi diskriminasi

Soekarno juga beranggapan dengan dipisahkannya Islam dari negara, agama akan menjadi subur dan merdeka. Mensitir ungkapan Menteri Kehakiman Turki, Mahmud Essay Bey, ia mengungkapkan, “agama itu perlu dimerdekakan dari belenggu pemerintahan, agar menjadi subur”.<sup>58</sup> “Subur” dan “merdeka”

---

<sup>56</sup> Seorang Hakim syari’ah dan professor di Al-Azhar University

<sup>57</sup>Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001), h. 132-136

<sup>58</sup>Soekarno, *Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara, Dibawah Bendera Revolusi* (Panitya Penerbit Dibawah Revolusi, 1963), h. 404-405

dalam arti Islam tidak akan digunakan sebagai alat legitimasi dan legalisasi oleh penguasa, apalagi penguasa yang selalu memanfaatkan agama demi kepentingan politiknya.

Menurut Soekarno agama merupakan masalah spiritual dan pribadi. Sedangkan kehidupan kenegaraan adalah masalah duniawi, temporal, dan kemasyarakatan. Bertolak dari asumsi ini Soekarno menilai bahwa aplikasi ajaran agama hanyalah tanggung jawab pribadi setiap Muslim dan sama sekali bukan masalah yang harus diurus oleh negara dan pemerintah.<sup>59</sup> Itulah dari sekian alasan Soekarno mengapa Islam harus dipisah dari negara. A, Suhelmi,<sup>60</sup> mengomentari pendapat Soekarno yang mengatakan bahwa Islam adalah urusan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan negara dengan sangat premature memfonis Soekarno sebagai sekuler. Kata Suhelmi,

*“Apakah mungkin kita dapat menganggap agama (dalam hal ini Islam) sebagai urusan pribadi dan dunia belaka? Menurut hemat penulis, (A. Suhelmi) gagasan pemisahan agama dari negara dengan titik tolak keyakinan bahwa agama merupakan masalah pribadi dan dunia (sic) (akirat, pen), merupakan gagasan seorang penganut sekularisme. Polarisasi dua bentuk kehidupan yang diyakini Soekarno tersebut, menempatkannya dalam posisi seorang sekuler. Seorang sekuler meyakini pemisahan agama dari politik adalah mungkin. Hal ini dilakukan dengan cara mengurung agama dalam soal kerohanian pribadi dan tidak dimaksudkan untuk terlibat dalam persoalan-persoalan politik.”<sup>61</sup>*

Fonis Suhelmi terhadap Soekarno sebagai sekuler terlalu berlebihan dan premature. Sebab kalau dilihat dan direnungkan komponen-komponen sekularisme dalam pandangan Harvey Cox ada tiga. *Pertama, Disenchantment of nature* mengandung

---

<sup>59</sup>A. Suhelmi, Soekarno Versus Natsir, “Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler, (Jakarta, Darul Falah, 1999), cet. Ke-1, h. 59

<sup>60</sup>A. Suhelmi. Ibid.

<sup>61</sup>A. Suhelmi, Ibid. h.61

pengertian pembebasan alam dari nilai-nilai agama agar masyarakat dapat melakukan perubahan dan pembangunan dengan bebas. *Kedua*, desentralisasi politik, bermakna, penghapusan legitimasi sakral atas otoritas dan kekuasaan. *Ketiga*, dekonsentrasi nilai-nilai berarti merelatifkan setiap sistem nilai, termasuk nilai-nilai agama.<sup>62</sup>

Kalau diteliti dan dicermati dari ketiga komponen sekularisme di atas, Soekarno hanya dapat dikategorikan sebagai sekuler hanya pada poin kedua, yaitu penghapusan legitimasi sakral atas otoritas dan kekuasaan. Dapat diartikan sebagai negara dan penguasa tidak berhak mengatur agama. Sementara pada poin pertama dan ketiga Soekarno hemat penulis justru memperteguh. Lihat misalnya,

*“Lagi pula, di sesuatu negeri yang ada demokrasi yang ada perwakilan rakyat yang benar-benar mewakili rakyat, di negeri yang demikian itu rakyatnya toch dapat memasukkan segala macam “keagamaannya” ke dalam tiap-tiap tindakan negara, ke dalam tiap-tiap undang-undang yang dipakai di dalam negara, ke dalam tiap-tiap politik yang dilakukan oleh negara, walaupun di situ agama dipisahkan dari negara. Djika rakyat berkobar-kobar ke-Islam-nja, tentu parlemen dibandjiri oleh ruh Islam; dan semua keputusan parlemen adalah bersifat Islam; dan djika rakjat padam ke-Islam-annja, tentu parlemen sunji dari ruh Islam dan semua keputusan parlemen bersifat Islam....”*<sup>63</sup>

Dengan demikian, menurut penulis, Soekarno tidak dapat disebut sekularis. Atau kalau pun mau disebut sebagai sekuler bukanlah sekuler murni tapi bisa disebut sebagai ‘semi sekuler’. Bahtiar Efendy juga berpendapat bahwa Soekarno termasuk dalam kategori substansialis yang menekankan pentingnya moral agama memainkan peranan dalam setiap produk undang-

---

<sup>62</sup> Firdaus Syam, Op.cit. h, 144

<sup>63</sup> Ibid.

undang dan peraturan-peraturan negara.<sup>64</sup> Badri Yatim melangkah lebih jauh lagi dengan mengatakan ‘walaupun Soekarno menganjurkan pemisahan agama dan negara, namun maksud dari pemisahan itu adalah bahwa secara formal tidak perlulah penyatuan agama dan negara itu dimasukkan di dalam undang-undang negara, apalagi negara yang sangat heterogen seperti Indonesia.’ Tapi, menurut Badri. Soekarno punya konsep integral sendiri yang menurut Soekarno, Kata Badri, merupakan arti yang sebenarnya dari cita-cita Islam. Hemat penulis, Badri tidak berlebihan. Sebab kalau dibaca paragraph demi paragraph dari tulisan Soekarno akan ditemukan alasan yang dapat mendukung pernyataan Badri itu, seperti:

*“Baiklah kita terima negara dipisahkan dari agama tetapi kita akan kobarkan seluruh rakyat dengan apinya Islam, sehingga semua utusan di dalam Badan Perwakilan itu, adalah utusan Islam, dan semua putusan-putusan Badan Perwakilan itu bersemangat dan berjihad Islam....Renungkanlah perkataan saja ini. Sebab, sungguh inilah menurut saya punja keyakinan arti yang sebenarnya dari cita-cita Islam, bahwa negara “negara bersatu dengan agama”. Negara bisa bersatu dengan agama meskipun azas konstitusinya memisahkan ia dari agama.”<sup>65</sup>*

Kita juga mengetahui bahwa Mesjid Istiqlal, mesjid terbesar di Asia Tenggara waktu itu, adalah ide Soekarno dan begitu juga Departemen Agama pun mulai dibentuk ketika Soekarno berkuasa dan sejarah tidak pernah mencatat adanya gagasan Soekarno untuk membubarkan Departemen Agama dan apalagi Mesjid Istiqlal.

---

<sup>64</sup> Bahtiar Efendy. *Islam dan Negara*, h.76

<sup>65</sup> Soekarno. *Mengapa Turki memisahkan agama dengan negara*. hlm. 453



# **BAB III**

## **NURCHOLISH MADJID DAN POLITIK ISLAM**

### **A. Mengenal Nurcholis Madjid**

#### **1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Sosial Politik**

Nurcholis Madjid dilahirkan di Jombang, Jawa Timur. Ia lahir pada tanggal 17 Maret 1939 M, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 H, dari kalangan keluarga pesantren. Ayahnya bernama KH. Abdul Madjid, seorang kiyai jebolan Pesantren Tebu Ireng dan seorang murid kesayangan KH. Hasyim Asy'ari, Rais Akbar NU. Sementara ibunya adalah adik murid dari Rais Akbar NU, dari ayah seorang aktivis Serikat dagang Islam (SDI) di Kediri, sewaktu organisasi ini masih banyak dipegang oleh para kiyai.<sup>66</sup>

Pendidikan dasar Nurcholish Madjid ditempuh di dua sekolah tingkat dasar, di Sekolah Rakyat (SR) di pagi hari, dan sore hari di Madrasah al-Wathaniyah, madrasah milik ayahnya sendiri yang keduanya di Mojoanyar, Jombang. Kemudian setelah menamatkan sekolah rakyat dan Madrasah Ibtidaiyyah, Nurcholish melanjutkan pendidikannya di Darul 'Ulum, Jombang. Ia juga mengikuti pendidikan di sekolah Menengah Pertama (SMP). Jadi, sejak tingkat pendidikan dasar, Nurcholish telah mengenal dua model pendidikan, pendidikan dasar pola madrasah yang tentu saja sarat dengan muatan kitab-kitab kuning (kitab-kitab Islam klasik yang berbahasa Arab tanpa tanda baca) sebagai rujukannya dan pendidikan umum yang juga cukup memadai dan sekaligus berkenalan dengan motede

---

<sup>66</sup>Nurcholish Madid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai-Nilai Islam Dalam Wacana Politik Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 1998), cet. Ke-I, h. 161

pengajaran modern.<sup>67</sup> Pada masa pendidikan menengah inilah, khususnya di Darul Ulum, Nurcholish telah menampakkan kecerdasannya dengan sering tampilnya dia sebagai juara kelas.<sup>68</sup> Dan sering mendapat penghargaan atas prestasinya.<sup>69</sup>

Nurcholish Madjid menjalani pendidikan di Pesantren Darul Ulum tidak lama, hanya kurang lebih dua tahun, seperti diungkapkannya bahwa ia tidak lama nyantri di Pesantren Darul Ulum. Itu sebabnya persoalan yang berkaitan dengan ayahnya. Seperti diketahui, ayah Nurcholish, KH. Abdul Madjid, adalah ulama dan tokoh NU dan ketika NU bergabung dengan Masyumi pada tahun 1945, ayahnya (begitu pula ibunya) jadi orang masyumi. Dan di saat NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952, karena satu dan lain hal, ayahnya tidak kembali ke NU dan tetap mempertahankan kebijakan berafiliasi dengan Masyumi, karena berpegang pada fatwa KH. Hasyim Asy'ari bahwa Masyumi (organisasi politik yang mempunyai massa paling banyak dan partai politik yang mendapat simpati luas dari pelosok nusantara yang pada mulanya juga merupakan pilihan politis warga dan para tokoh NU) adalah satu-satunya partai politik Islam Indonesia yang sah.<sup>70</sup> Sikap politik ayahnya itu berdampak kurang lebih baik bagi kehadiran Nurcholish di Pesantren darul Ulum. Nurcholish selalu diejek sebagai anak Masyumi yang kesasar ke sarang NU.<sup>71</sup>

Realitas itulah yang membuat Nurcholis meminta ayahnya kembali ke NU. Tetapi ayahnya tetap konsisten pada Masyumi, akhirnya Nurcholish lebih memilih pindah ke Pesantren Darussalam, Gontor Jawa Timur, sebuah pesantren yang

---

<sup>67</sup>Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Majdid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), cet, ke I h. 21

<sup>68</sup> Nurcholish Madjid, *Dialog...*

<sup>69</sup> Siti Nadroh, *Wacana....*

<sup>70</sup> Nurcholish Madjid, *Dialog...*

<sup>71</sup> Agus Edi Santoso, *Tidak Ada Negara Islam, Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid – Mohammad Roem*. (Jakarta: Djambatan, 1997), cet. Ke-I h. 37.

memberikan nuansa pemikiran bebas dan reformis. Sesuai dengan semboyannya “berfikir bebas, setelah berbudi tinggi, berbadan sehat dan berpengetahuan luas”, sehingga terbentuklah iklim pendidikan yang menciptakan berfikir kritis dan bebas dalam artian tanpa memihak kepada salah satu mazhab terkenal dalam khazanah pemikiran yuridis (fikih) ataupun bidang-bidang lain seperti teologi Islam secara fanatic dan menawarkan kehidupan sosial yang relative modern. Di samping menekankan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris kepada semua santrinya dan bahkan dua bahasa ini adalah bahasa wajib dan bahasa pengantar di Pesantren tersebut.

Melihat dari latar belakang pendidikan Nurcholish di tingkat dasar dan menengah, dapatlah dikatakan bahwa Nurcholish sangat terdidik dalam ilmu keislaman dan umum. Ditambah dengan kemampuan berbahasa dan membaca aksara arab dan Inggris secara baik, tentu sangat membantu dia untuk mengakses buku-buku klasik dan modern, baik tentang khazanah pemikiran Islam ataupun pemikiran filsafat Barat Modern.

Aktivitas ayahnya di partai politik (dalam hal ini partai Masyumi) juga tentu menyediakan media bagi Nurcholish untuk mengenal kultur dan tradisi yang berbeda dari yang selama ini ia hayati. Sebagaimana kita ketahui bahwa aktivis-aktivis Masyumi didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan Barat modern. Dan yang tak kalah pentingnya yang juga sangat memberikan kontribusi bagi pengembangan intelektual Nurcholis adalah suasana kampus yang dipilihnya ketika dia telah menyelesaikan pendidikan tingkat atasnya di Darussalam, Gontor yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dia memilih jurusan Sastra Arab dan Sejarah Pemikiran Islam Fakultas Dakwah, jurusan yang relevan dengan latar belakang pendidikan yang telah digelutinya semenjak tingkat dasar. Fakultas arab merupakan fakultas yang mengantarkan para mahasiswanya ke khazanah kebudayaah



Islam, baik klasik maupun modern. Nurcholish berhasil dengan baik dapat menyelesaikan sarjana lengkapnya pada tahun 1968 dengan judul skripsi “*al-Qur’an ‘Arabbiyah Lughatan wa ‘Alamiyyun ma’nan* (al-qur’an ditinjau dari sudut bahasa bersifat local, dipandang dari sisi makna bersifat universal). Ditulis dengan bahasa Arab.<sup>72</sup>

Setelah menyelesaikan program sarjana lengkapnya, Nurcholish kemudian mengabdikan dirinya di almamaternya selama beberapa tahun di samping bekerja di LIPI (Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia) sebagai peneliti. Nurcholish kemudian melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, yakni tingkat doctoral di Chicago University di Amerika Serikat. Kurang lebih enam tahun akhirnya, ia bisa menyelesaikan gelar doktornya dengan judul disertasi “*Ibnu Taymiya on Kalam and falsafah : Problem of reaon and Revelation ini Islam*. (Ibnu Taymiyah tentang Kalam dan Falsafah)<sup>73</sup>

## 2. Aktivitas dan Arus Modernisasi

Selain aktif di kampus, Nurcholish Madjid juga selalu aktif dalam kegiatan organisasi di luar kampus. Ia menambah pengalaman organisasinya sekaligus berpartisipasi dalam sebuah organisasi mahasiswa Islam yang cukup terkenal dan solid yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Nurcholish Madjid mulai terjuan ke organisasi ini pada tahun 1963, kira-kira setelah empat semester masa perkuliahannya. Dimulai dari tingkat cabang, Nurcholish sudah menunjukkan kejeniusannya sebagai seorang pemimpin yang banyak dikagumi orang, baik kawan maupun rival-rivalnya. Karir organisasinya semakin diperhitungkan ketika tahun 1966 HMI melakukan kongres di kota Solo, Nurcholiss sebagai ketua cabang pinggiran, Ciputat, menjadi

---

<sup>72</sup> Komaruddin Hidayat dalam Kata Pengantar, Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 2000), cet. Ke-2 h. Xiii

<sup>73</sup> *Ibid.*

calon kuat ketua pengurus Besar HMI. Dan karena pesona pribadinya dan citra kepemimpinannya yang menonjo, ia terpilih menjadi ketua umum PB HMI.<sup>74</sup> Pada tahun 1968 atas undangan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Nurcholis berkesempatan mengunjungi negeri tersebut. Selama di Amerika, ia sempat berbagai Universitas, mengalami kehidupan politik dan sosial keagamaan serta berdiskusi dengan sejumlah tokoh. Sepulang dari Amerika, ia melanjutkan lawatan ke kawasan Timur Tengah, diantaranya Saudi Arabia, Irak dan Kuwait. Pengalaman tersebut membuatnya terinspirasi mencari esensi Islam dan masyarakat Muslim karena ia melihat sebagian negara-negara Barat lebih 'segala'nya dari negara-negara Muslim. Akumulasi pengalaman di tambah dengan pergolakan pemikiran yang dialaminya, akhirnya melahirkan konsep Nilai Dasar Perjuangan (NDP). Konsep itu kemudian disahkan dalam kongres HMI tahun 1969 di Malang, yang sekaligus membuatnya terpilih kembali sebagai ketua Umum PB HMI untuk kedua kalinya periode 1969-1971.<sup>75</sup> Selanjutnya dia juga menempati formasi penting di organisasi-organisasi dunia. Antara lain, ia pernah menduduki Presiden PEMIAT (Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara) tahun 1967-1969 dan pernah menjadi wakil sekjen IIFSO (Internasional Islamic Federation of Student Organization) tahun 1969-1971. Sekian banyak lagi jabatan strategis yang disandangnya, dan yang belakangan yang cukup terkenal adalah sebuah yayasan yang didirikannya sendiri bersama teman-temannya yaitu Yayasan Wakaf Paramadina. Sebuah yayasan tempat orang-orang menengah kota berdiskusi masalah-masalah keagamaan. Di Paramadina inilah pemikiran-

---

<sup>74</sup> Siti Nadroh, *Wacana...* h.26

<sup>75</sup> Ahmad Amir Aziz, *Neo Modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*. (Jakarta ; PT. Renika Cipta, 1999), cet. keI, h.23.

pemikiran Nurcholish Madjid menemukan tempat sosialisasinya.<sup>76</sup>

Di saat Nurcholish aktif di Organisasi, Khususnya HMI, aktivitas intelektualnya menampakkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan karena ia banyak berhadapan dan bersentuhan dengan realitas sosial yang mendorongnya ikut aktif memikirkan solusi dan sekaligus mengimplementasikannya dalam realitas bagi bangsa, negara, dan agama.

Sejak usai Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia, terutama negara-negara dunia ketiga, disibukkan dengan segala modernisasi. Dalam sejarah kemunculannya, Modernisme dipandang sebagai upaya dekonstruksi terhadap dominasi agama/gereja pada abad pertengahan (kira-kira abad 14-15). Pada masa ini agama Kristen di Eropa merupakan agama otoritarianistik dan tertutup dari penafsiran kontekstual, apalagi menganeksasi oleh pemikiran modern. Modernism menawarkan paradigma dan konsep hidup, baik yang berhubungan aspek ontology, epistemologi, dan aksiologi berdasarkan pada premis-premis rasionalisme, positivism, dan empirisme. Alhasil, modernism menampilkan diri sebagai paham yang mampu mendatangkan babak baru dalam sejarah manusia, yaitu renaissance yang ditandai dengan tiga hal penting. Pertama, kebebasan dan kemerdekaan manusia. Kedua, degradasi fungsi agama. Ketiga, reformasi ilmu pengetahuan.<sup>77</sup> Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah modernism sudah berhasil memberikan semua kebahagiaan yang diinginkan oleh manusia? Jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak. Karena terbukti, walaupun modernism berhasil memberikan apa yang diinginkan manusia yang bersifat materi, tapi modernisme gagal mempertautkan seluruh aspek sosio-kultural manusia dalam sebuah

---

<sup>76</sup> Siti Nadroh. *Wacana...*,

<sup>77</sup> Siti Nadroh. *Wacana...*, h 86.

paradigm. Modernism tidak mengindahkan sisi manusia yang paling fundamental yaitu kesadaran kemanusiaan.

Di Indonesia pun wacana modernisasi diperbincangkan orang tidak kalah serunya. Modernisasi merupakan tema hangat yang semakin hari semakin hangat dibicarakan orang. Menjelang pergantian dasawarsa 60-an modernisasi dianggap sebagai alternatif dari tema revolusi yang dianut pada masa Orde Lama. Banyak diskusi diselenggarakan, baik terbuka dan terbatas. Di lingkungan HMI, masalah modernisasi merupakan topik pembahasan di latihan-latihan kader, bahkan di konferensi-konferensi cabang di berbagai kota yang ada universitasnya.

Pada tahun 1968, Nurcholish Madjid ketika itu sudah terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI periode 1966-1969, menulis artikel panjang yang berjudul ‘Modernisasi Ialah Rasionalisasi, bukan Westernisasi’. Sebagai seorang sarjana Muslim yang dididik di dalam ilmu-ilmu keislaman, tapi dengan bacaan buku-buku umum yang cukup luas, termasuk kepustakaan asing yang berbahasa Arab maupun Inggris Nurcholish berusaha untuk member “Jawaban Islam” terhadap masalah modernisasi. Inti jawaban tercakup dalam kesimpulan sikapnya;

“Kita sepenuhnya berpendapat bahwa modernisasi ialah rasionalisasi yang ditopang oleh dimensi-dimensi moral dengan berpijak pada prinsip iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi kita juga sepenuhnya menolak pengertian yang mengatakan bahwa modernisasi ialah westernisasi, sebab kita menolak westernisasi. Dan westernisme yang kita maksudkan itu ialah suatu total way of life, dimana faktor yang paling menonjol ialah sekularisme, dengan segala percabangannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas.”<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Dawam Raharjo dalam Kata Pengantar, Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1988), cet, ke 11, j 18.

Dari sikapnya itu terlihat, bahwa bagi Nurcholish, modernisasi itu identik dengan rasionalisasi. Rasionalisasi didefinisikan sebagai perombakan terhadap pola pikir dan tata kerja lama yang tidak rasional, dan menggantinya dengan bentuk baru yang lebih rasional. Gunanya adalah ‘untuk memperoleh daya guna dan efesiensi yang maksimal.’<sup>79</sup> proses demikian diperoleh berdasarkan penerapan hasil temuan pengetahuan terakhir, karena ilmu pengetahuan tidak lain adalah hasil dari pemahaman manusia atas hukum-hukum obyektif yang mengatur alam semesta ini. Selanjutnya menurut Nurcholish, modernisasi itu merupakan suatu keharusan mutlak. Sebab modernisasi dalam pengertian itu berarti bekerja dan berfikir secara ilmiah, bersikap dinamis dan progresif dalam mendekati kebenaran-kebenaran universal.<sup>80</sup>

Dalam kaitan ini pula Nurcholish menolak sekularisme sebagai suatu ideologi, karena ia berkaitan dengan atheism. Atheism merupakan puncak sekularisme. Sedangkan sekularisme adalah puncak dari immoralitas. Bagi Nurcholish, sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum Muslimin menjadi sekularis. Sekularisasi, tulis Nurcholish, dimaksudkan sebagai menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya.

Modernisasi sebagai sebuah paham, sebagaimana telah disebutkan diatas, merambah ke semua lapangan kehidupan. Ketika modernisasi menyentuh lapangan ekonomi, maka akan mempengaruhi beroperasi dan berkembangnya sistem ekonomi masyarakat bawah. Tapi, ketika modernisasi merambah ke dalam kehidupan beragama- tak terkecuali politik, karena politik dalam keyakinan sebagian penganut Islam, tak terpisahkan dari agama, politik adalah bagian dari agama- maka modernisasi

---

<sup>79</sup> Siti Nadroh, h. 29.

<sup>80</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Komodernan...* h. 172-173.

telah menciptakan masyarakat, terutama masyarakat di suatu negara yang dihuni oleh mayoritas Muslim seperti Indonesia, menjadi terkotak-kotak.

Pertanyaan krusial yang muncul ketika politik bersentuhan dengan arus modernisasi adalah apakah sistem politik di Indonesia harus bersifat ideologis atau berorientasi kepada program.<sup>81</sup> Terungkap bahwa cendekiawan sekuler menganggap kekuatan Islam sebagai kendala bagi modernisasi. Sebagian mereka meremehkan kualitas dan kapabilitas dari para pemimpin Islam Tradisional.

Konsekuensi logis yang timbul dari persentuhan modernisasi dengan politik, terutama di Indonesia, adalah penolakan terhadap partai Islam atau negara Islam. dan dapat pula disebutkan bahwa tokoh pada era 1970-an yang paling lantang menyuarakan tidak adanya konsep negara Islam yang berimplikasi depolitisasi Islam dalam arti partai bukanlah satu-satunya sarana untuk memperjuangkan Islam dan partai Islam sebenarnya tidak diperlukan, adalah Nurcholish Madjid<sup>82</sup> dan kawan-kawan.

Gagasan sekularisasi atau desakralisasi Nurcholish Madjid mendapat tanggapan beragam. Di satu pihak, M Natsir, Hamka, Rasjidi dan sekian banyak yang lain, khususnya generasi tua, menyayangkan apa yang dilakukan Nurcholish. Padahal Nurcholish diharapkan akan menjadi generasi penerus mereka dalam memperjuangkan tercapainya persatuan agama negara. Di lain pihak, terutama generasi muda seperti Dawam Raharjo, Abdurrahman Wahid (Gusdur), dan sekian kaum “Madjidis” memandang hal ini adalah satu kemajuan yang kelak bisa menciptakan negara Indonesia yang majmuk, sekalipun harus mengorbankan persatuan interen Islam.

---

<sup>81</sup> Siti Nadroh. *Wacana...*, h.30

<sup>82</sup> Gagasan Nurcholish tentang tidak adanya negara Islam dan tidak perlunya partai Islam terkenal dengan semboyan “Islam, yes, partai Islam No!” adalah menyambung lidah Soekarno dan Soeharto.

Dengan adanya sekularisasi dan desakralisasi dalam kehidupan politik umat Islam tersebut, nampaknya Nurcholish berharap akan tercipta suatu efek yang meruntuhkan monopoli dan konsentrasi kekuasaan melalui control terhadap sistem simbolik keagamaan di tangan para pemimpin partai Islam itu. Ia juga berharap, melalui konsep yang sama, akan terjadinya pemekaran kekuasaan yang memberikan dasar pembenaran bagi siapa saja untuk merasakan dirinya sebagai seorang Muslim, kendatipun ia tidak pernah berhubungan dengan ideology dan partai-partai yang secara formalistic bersimbol Islam.

## **B. Islam dan Politik Menurut Nurcholish Madjid**

### **1. Nurcholish Madjid, Partai Islam , dan Negara Islam**

Untuk melacak pandangan Nurcholish Madjid tentang politik dalam kaitannya dengan keislaman dan kenegaran dalam konteks negara yang heterogen tertinggi di dunia seperti Indonesia, memerlukan analisa tentang latar belakang sosial kehidupan, meminjam istilah Tempo, sang Lokomotif, Nurcholish Madjid. Selain, dan yang paling signifikan adalah, situasi dan kondisi sosial politik ketika pandangan dan pemikiran politik itu dirumuskan dan disosialisasikan. Bertolak dari realitas itu akan dapat dirumuskan hal-hal yang melatar belakang premis-premis serta perumusan-perumusan besar pemikiran Nurcholis Madjid. Dengan mengetahui latar belakang sebab-sebab lahirnya pemikiran itu tentu akan sangat membantu memahami orientasi dan maksud dari sang pemikir yang sedang dibicarakan. Tak ubahnya seperti, dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an hal itu akan memudahkan para mujtahid untuk merumuskan maksud ayat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Yang menurunkannya.

Dapat penulis sebutkan bahwa Nurcholish Madjid lahir dalam suasana bergolak, sosial maupun politik. Lahir tiga tahun menjelang terusirnya penjajah Belanda dari bumi Indonesia yang kemudian digantikan oleh pendudukan Jepang dalam masa

selama kurang lebih tiga setengah tahun (1942-1945) dan kemudian Jepang –pun terusir dari Indonesia. Tentu sedikit banyak Nurcholish merasakan gejolak masa transisi dan perubahan besar dalam masyarakat Indonesia sebagai akibat dari peralihan pemerintahan dari pemerintahan bangsa penjajah ke pemerintahan bangsa sendiri. Bagaimanapun situasi krusial ini akan mempengaruhi kesadaran Nurcholish Madjid dan juga orang-orang yang sezaman dengannya tentang arti dinamika sebuah entitas kultural sebuah masyarakat.

Masalah yang juga cukup memberi warna bagi diri dan pemikiran Nurcholish Madjid, seperti dipaparkannya, adalah pada tahun 1952, karena satu dan lain hal Nahdhatul Ulama (NU) memutuskan untuk keluar dari Partai Islam Masyumi dan membentuk wadah politik sendiri, setelah sebelumnya berafiliasi dengan Masyumi selama kurang lebih 7 tahun. Selama berafiliasi dengan Masyumi, semua suara warga NU, termasuk para kiyai dan ulama sepuh, yang besar itu diharuskan untuk kemenangan “kakek” Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Namun, ayahanda Nurcholish, KH. Abdul Madjid, yang juga merupakan tokoh besar dan ulama besar NU, memilih tetap bergabung dengan Masyumi. Sementara Nurcholish Madjid saat itu sedang nyantri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, milik NU. Sikap politik ayahanda Nurcholish yang tetap berafiliasi dengan Masyumi ini membawa dampak bagi kehadiran Nurcholish di Pesantren Darul ‘Ulum, Jombang itu. Ini terjadi ketika ia harus keluar, atas permintaannya sendiri, dari pesantren karena selalu mendapat ejekan sebagai ‘anak Masyumi yang kesasar di kandang NU’.<sup>83</sup> Kenyataan yang ia alami ini sendiri,

---

<sup>83</sup>Fachri Ali, *Intelektual dan Pengaruh Pemikiran dan Lingkungannya*, dalam kata Pengantar buku Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai-Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik*, (Jakarta: Paramadina, 1998), cet. keI, h. Iii



sebagaimana diakuinya, sangat berpengaruh dalam membentuk karakter pribadi dan pemikirannya.<sup>84</sup>

Tapi di atas segala-galanya, kata Fachry, secara kultural dan Intelektual, periode transisi itu justru dialaminya secara langsung di dalam keluarganya oleh perubahan lingkup nasional yang mungkin tidak dikenali semasa kecil. Nurcholish melalui ayahnya, ikut terbawa masuk ke dalam sebuah arus baru, yaitu perpindahan budaya politik, dari kepemimpinan yang bersifat tradisional,<sup>85</sup> (NU) kepada kepemimpinan yang (Islam) modern (Masyumi). Ini terjadi ketika ayahanda Nurcholish, melalui fatwa KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU, memutuskan masuk kedalam Masyumi, ketika partai itu berdiri pada tanggal 7 November 1945.<sup>86</sup> Perpindahan yang secara kasat mata dianggap biasa ini, kata Fachry, melahirkan pengaruh yang krusial bagi Nurcholish secara kultural dan apalagi secara intelektual. Kenyataan ini menurutnya, mustahil jika tak melahirkan pengaruh tertentu kepada Nurcholish. Sebab, hidup pada sebuah keluarga masa lalu yang menjadikan ayah sebagai sentral keputusan, pastilah perubahan afiliasi budaya politik orang tua akan mematrikan persepsi khusus dalam diri anaknya. Apalagi dalam konteks Nurcholish, bukan hanya ayahnya yang terlibat aktif di dalam Masyumi, melainkan ibunya yang juga pernah bertindak sebagai juru kampanye partai Islam itu.<sup>87</sup> Tapi sebenarnya yang menjadi inti persoalan bukan hanya label, melainkan sesuatu yang lebih mendasar. Masuknya sang ayah ke dalam Masyumi itu berarti membiarkan struktur keluarganya

---

<sup>84</sup> Ibid. h. 161.

<sup>85</sup> Tradisional bermakna sebuah doktrin yang menekankan pelestarian dari apa-apa yang sudah menjadi ketetapan oleh orang-orang yang dianggap mumpuni di bidang itu dan selamanya tetap dipertahankan walaupun oleh sebagian orang, terutama orang-orang yang berfikir modern, dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, dan ataupun tidak relevan lagi dengan interpretasi baru.

<sup>86</sup> Fachry Ali, Loc. cit

<sup>87</sup> Ibid. h.iii

menjadi wadah bagi penetrasi pengaruh-pengaruh pemikiran baru. Masyumi sebagaimana diketahui adalah orsospol Islam yang dikelola oleh kaum intelegensia Islam yang telah bersentuhan dengan pendidikan modern Barat. Dengan demikian, masuknya pengaruh pemikiran modern Masyumi ke dalam pola pikir dan praktis keseharian menjadi wahana di mana Nurcholish dapat meluaskan jaringan cakrawala pemikirannya lintas kultural lokal di saat dia masih dini.<sup>88</sup> Dengan latar belakang lintas kehidupan yang demikian kompleks, tentu akan memberikan gambaran kepada kita tentang persoalan dan gagasan yang kemudian ia lontarkan yang sebagian orang yang tidak cermat dan secara premature akan memfonis bahwa ia telah kafir dan darahnya halal untuk ditumpahakan. Wallahu'alam

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kondisi sosial politik memainkan peran penting dalam membentuk latar belakang pemikiran seorang tokoh, maka dalam konteks Nurcholish Madjid, agaknya, kondisi politik, khususnya pertentangan ideologi dan dasar negara antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler, yang carut marut semasa Orde Lama yang kemudian di perparah dengan era Orde Baru lah yang menjadi sutradara yang memainkan peran penting bagi terbentuknya kerangka teori pemikiran Nurcholish Madjid tentang sekian banyak masalah, terutama tentang masalah hubungan agama (Islam) dan negara.

Sebagaimana diketahui bahwa ada dua permasalahan utama yang membawa tumbangnya rezim Orde Lama, yaitu masalah politik dan ekonomi. Persoalan ekonomi, seperti tingginya inflasi yang mencapai 650 persen, membengkaknya angka pengangguran dan memusatnya kekuatan ekonomi dunia maupun kawasan merupakan salah satu di antara sekian banyak faktor pemicu yang mengkrucut dan mempercepat terjadinya

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

gerakan revolusi yang kemudian berakhir dengan meletusnya peristiwa tragis 30 September 1965.

Kondisi di atas menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Orde Baru. Perjalanan sejarah perpolitikan dan ekonomi di masa Orde Lama itu tak heran kalau pada tahun-tahun pertama sesudah tahun 1965, penguasa Orde Baru mengambil langkah perombakan besar-besaran dalam tatanan kehidupan ekonomi dan politik. Orde Baru melakukan langkah-langkah strategis dengan cara memodernisasi semua struktur sosial yang ada, terutama ekonomi. Kalau di era Orde Lama, pembangunan ditekankan pada bidang politik, maka Orde Baru mengubahnya dan lebih menekankan perubahan itu di bidang ekonomi. Jargon politik no, ekonomi yes! seringkali disuarakan pada awal pemerintahan Orde Baru.<sup>89</sup> Untuk memperlancar semua program itu stabilitas merupakan prinsip yang paling penting bagi pemerintah. Pada awal decade 1970-an pemerintah melakukan restrukturisasi politik dalam usaha untuk menciutkan peran politik masyarakat untuk suksesnya stabilitas. Reproduksi sistem politik yang ditandai oleh semakin kuatnya kekuatan negara melalui militer, dalam hal ini ABRI, juga birokrasi, dan Golkar juga diikuti dengan melakukan fusi semua partai yang ada. Dari sejumlah partai direduksi menjadi dua partai politik : PPP dan PDI. Tidak hanya itu, perombakan juga terjadi dalam struktur jabatan fungsional dengan menempatkan orang-orang yang loyal dan membela kepentingan pemerintah lewat Golkar. Tak heran bila jabatan dari tingkat menteri sampai pejabat kepala rukun tangga (RT) adalah orang-orang orientasi politiknya ke Golkar, walaupun dengan cara yang tidak fair. Sementara pemimpin-pemimpin politik yang tidak sealiran dan menampakkan sikap yang tidak loyal dengan pemerintah disingkirkan dan digantikan dengan pemimpin yang lunak yang setiap saat bisa dikontrol. Namun agaknya, yang paling

---

<sup>89</sup> Abd. Aziz Thaba, *Islam dan Negara...Op.cit*,h.188

menyakitkan hati umat Islam, terutama Islam politik, adalah ketika pemerintah Orde Baru dengan cara yang otoriter melakukan desimbolisasi, deideologisasi, dan depolitisasi, khususnya, terhadap umat Islam dan partai Islam.

Dari beberapa kebijakan di atas, Orde Baru menawarkan atau bahkan melaksanakan warna kehidupan baru kepada masyarakat, sekaligus menciptakan struktur sosial ekonomi dan politik baru. Atas nama modernisasi, peta perpolitikan struktur sosial ekonomi dan politik baru. Atas nama modernisasi, peta perpolitikan Indonesia mengalami perubahan paradigm, dari yang semula idiologi oriented, di masa Orde Baru menjadi develomented oriented.<sup>90</sup>

Akan tetapi, suatu hal yang paling mendasar adalah bahwa atas nama modernisasi dan pragmatism pembangunan yang melahirkan banyak kebijakan memaksa umat Islam, terutama intelektual Islam politik yang lunak dan akomodatif, melakukan reinterpretasi dan penyesuaian-penyesuaian strategis sehingga mereka tetap eksis dalam gejolak perubahan yang berlangsung dan tak terhindarkan. Sedangkan bagi sebagian intelektual Islam Politik yang menganggap bahwa apa yang ditawarkan atau bahkan dipaksakan oleh pemerintah Orde Baru adalah suatu kezaliman dan melanggar hak azazi mereka untuk berpartisipasi dan mengaplikasikan ajaran agama mereka, biasanya mereka keluar dari arena sambil mengadakan perlawanan. Akibatnya tidak jarang mereka ditangkap untuk diasingkan, atau dipenjarakan, atau yang lebih mengenaskan lagi mereka menemui ajalnya di tangan penguasa Orde Baru. Contoh yang refresentatif dalam kasus ini adalah pentulan Partai Masyumi. Setelah dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960 dengan “tangan besinya”, di era Orde Baru mereka berharap partai mereka akan direhabilitasi dan mereka akan ikut aktif dalam panggung politik nasional. Harapan mereka itu didasarkan pada

---

<sup>90</sup> Siti Nadroh, *Wacana....* h. 170.

kenyataan bahwa mereka adalah elemen penting umat Islam yang berperan besar menghancurkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah merongrong keutuhan bangsa. Tapi harapan memang tidak selalu sama dengan kenyataan. Di tangan Orde Baru mereka malah di tangkap dan dipenjarakan dengan alasan melakukan makar.<sup>91</sup> Padahal alasan yang kongkrit mengapa pemerintah Orde Baru tidak mau merehabilitasi Partai Masyumi adalah lebih dikarenakan karena format politik Orde Baru tidak menghendaki “kekuatan penyeimbang” dan begitu kuatnya sikap fobia pemerintah dan kalangan militer akan munculnya kekuatan Islam politik. Siti Nadroh mengungkapkan dalam bahasa yang sangat lugas, katanya,

*“Dalam kaitan ini bemat penulis, alasan mendasar pemerintah tidak mau merehabilitasi Masyumi lebih disebabkan karena faktor politis ketimbang ideologis. Artinya pemerintah merasa kekuatan dan curiga -se bagaimana yang dikatakan Franz Rudianto munculnya ekstrem Islam yang akan mewarnai wacana perpolitikan Orde Baru dan mampu mengimbangi atau membahayakan kekuatan negara dibandingkan dengan sikap keras aktivis Masyumi untu tetap memperjuangkan “Negara Islam”.”<sup>92</sup>*

Sebagaimana telah disebutkan di bab satu, bahwa di saat kekecewaan intelektual Masyumi sudah mencapai puncaknya karena keengganan pemerintah untuk merehabilitasi partai mereka dan melarang mereka menempati posisi penting dalam kepengurusan partai Parmusi, muncul seorang intelektual muda, Nurcholish Madjid, yang banyak dikagumi orang akan kejeniusanya serta kepemimpinannya yang ia miliki yang diharapkan akan menggantikan posisi M. Natsir sebagai generasi penerus untuk memperjuangkan cita-cita suci, bersatunya Islam

---

<sup>91</sup> Untuk lebih jelas masalah ini, dapat dilihat dalam catatan kaki no. 6

<sup>92</sup> Siti Nadroh, *Catatan Kaki no. 24. Wacana..* h.172

dan negara. Harapan itu sebenarnya tidak berlebihan mengingat secara intelektual Nurcholish memiliki kemiripan dengan M. Natsir. Keduanya memiliki wawasan khazanah intelektual (klasik) Islam serta pemikiran (filsafat) modern (Barat).

Nurcholish seperti halnya M. Natsir, adalah pemikir kosmopolitan yang mampu menyerap filsafat modern Barat karena keduanya menguasai beberapa bahasa asing. M. Natsir menguasai bahasa Inggris, Perancis, Arab, dan Belanda, sementara Nurcholish. Menguasai Inggris, Perancis, Arab dan Parsi. Bahkan secara pribadi, Nurcholish memiliki hubungan yang amat dekat dan baik dengan M. Natsir. Pasalnya, sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, ayah kandung Nurcholish, KH. Abdul Madjid, memiliki hubungan organisatoris dan emosional yang amat kental dengan M. Natsir, meskipun lahir dan dibesarkan dalam tradisi NU.<sup>93</sup> Namun, sekali lagi, keinginan memang tidak selalu sama dengan kenyataan. Nurcholish yang kalem ternyata menyimpan misi yang sama sekali berbeda dengan apa yang diharapkan sekian banyak orang, terutama oleh M. Natsir dan Hamka yang ia kagumi, walaupun belakangan ia (Nurcholish) mengklaim bahwa sebenarnya apa yang ia lakukan sekarang adalah sama dengan apa yang diyakini dan diperjuangkan oleh M. Natsir.<sup>94</sup>

Pada awal tahun 1970-an Nurcholish Madjid, melontarkan gagasan sekularisasi dalam rangka menjawab tantangan modernisasi yang menjadi titik pusat orientasi pemerintah Orde Baru. Gagasan itu muncul dari kekhawatiran dan kegelisahan Nurcholish Madjid akan situasi politik Indonesia, khususnya politik umat Islam. kegelisahan itu kemudian dituangkan dalam ide pembaharuan yang mencapai puncak pada pidatonya dalam acara malam silaturahmi organisasi pemuda, pelajar, mahasiswa

---

<sup>93</sup> Firdaus Syam, Amien Rais... h.123

<sup>94</sup> Panjimas, Nurcholish Madjid, "*Justru Yang Saya Lakukan Itu yang Dikehendaki Natsir*". (Juni, 2003) No. 13 tahun I

dan sarjana Muslim yang tergabung dalam HMI, GPI PII dan Parmusi pada tanggal 3 Januari 1973 di Gedung Pertemuan Islamic Research Centre, Menteng Raya, Jakarta. Dalam ceramah yang berjudul “*Kebarusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat*” itu Nurcholish mengemukakan pengamatan terus terang bahwa kaum muslim Indonesia mengalami kemandegan dalam pemikiran keagamaan dan telah kehilangan ‘kekuatan daya gerak psikologis’ dalam perjuangan mereka.<sup>95</sup> Indikasi penting dari kemandegan ini, dalam pengamatannya, adalah ketidakmampuan mayoritas kaum Muslim untuk membedakan antara nilai-nilai transendental dan temporal. Bahkan kedua nilai itu sering dilakukan terbalik: nilai-nilai yang mestinya transenden dipahami sebagai nilai-nilai yang temporal, dan sebaliknya. Segala sesuatu tampak dipandang sebagai bersifat transendental dan karenanya- tanpa terkecuali dinilai sakral. Akibat dari keberagaman seperti ini, Islam dipandang sebagai senilai dengan tradisi. Dalam kaitan inilah ia menganggap perlunya umat Islam melakukan sekularisasi<sup>96</sup> terhadap pemikiran Islam. Sekularisasi yang dimaksud bukanlah penerapan sekularisme dalam defenisi filosofis, dalam arti satu paham yang mengandung pemisahan agama dari negara, atau

---

<sup>95</sup>Nurcholish Madjid, *Keharusan Pembaharuan Pemikiran dan Masalah Integrasi Umat dalam “Islam Kemodernan dan Keindonesiaan”*, (Bandung; Mizan, 1998) cet. Ke-11, h.204

<sup>96</sup>Ibid. h.205. istilah ini kemudian oleh Nurcholish, karena banyaknya tanggapan dan kritik dari intelektual Muslim, seperti Rasjidi, Abdul Qadir Djaelani, Daud Rasyid, dan sekian banyak yang lain, dengan mengirim surat ke Tempo sekitar tahun 80-an ia nyatakan sebagai ‘misconception’ oleh karena itu ia meralatnya dan mengganti dengan istilah ‘desakralisasi’ dan “rasionalitas”. Rasjidi, misalnya mengatakan ‘Saudara Nurcholish Madjid melukiskan seolah-olah Islam memerintahkan sekularisasi dalam arti tauhid...secara ekstrem boleh saja kata sekularisasi tersebut diganti dengan pisang goring, atau kopi jahe dan sebagainya dengan tidak ada konsekuensinya apa-apa...’ Lihat Jalaluddin Rahmad, et.al, *Thariqat Nurkhalisyh*, (Jakarta ; Pustaka Pelajar, 2001), Cet, h. 108-109

memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, tapi sekularisasi yang dia maksud, sebagaimana diakuinya diambil dari Talcot Parson, Harvey Cox, dan Robert N. Bellah<sup>97</sup> yang mengandung makna sosiologis yang dapat diartikan sebagai ‘pembebasan atau menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya”. Atau lebih jelasnya yang dimaksudkan sekularisasi oleh Nurcholish, sebagaimana ungkapnya.” Dengan istilah sekularisasi itu saya maksudkan berbagai bentuk pembebasan diri dan umat dari cara pendekatan dan penyelesaian yang salah kaprah terhadap berbagai problema, khususnya problema politik”.<sup>98</sup> Sekularisasi juga bukanlah westernisasi. dalam pengertian ini menurut Nurcholish, sekularisasi pada hakikatnya adalah rasionalisasi dan desakralisasi. Terdapat konsistensi antara sekularisasi dan rasionalisasi, sebab substansi sekularisasi adalah memecahkan dan memahami masalah-masalah duniawi dengan mengerahkan kecerdasan (rasio).<sup>99</sup> Upaya rasionalitas, dalam pengertian berpikir ilmiah, sangat dimungkinkan, kalau dunia sebagai obyek pemikiran ilmiah dilepaskan dari mitos-mitos yang mensakralkannya.

Desakralisasi, demitologisasi, atau sekularisasi mengimplikasikan “devaluasi radikal’ terhadap obyek-obyek mitologi: diturunkannya nilai-nilai sakral menjadi obyek yang hanya mengandung kegunaan praktis.<sup>100</sup> Maka, tegas Nurcholish, segala sesuatu harus kembali ke prinsip tauhid yang terangkum

---

<sup>97</sup> Siti Nadroh, *Wacana...*

<sup>98</sup> Agus Edi Santoso (Peny.) *Tidak Ada Negara Islam...* h 1992)cet. Ke-2, h XXV

<sup>99</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan...* h. 229

<sup>100</sup> Nurcholish Madjid. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan. Kemanusiaan dan Kemodernan.* (Jakarta: Paramadina, 1992)cet



dalam kalimat syahadat, di mana orang harus mantap dan tidak mentabukan “sesuatu” karena hanya Tuhan lah yang tabu.<sup>101</sup>

Dengan demikian, sekularisasi yang dimaksudkan Nurcholish berarti pembebasan tatanan sosio kultural dari ikatan-ikatan formal keagamaan. Agama ditempatkan pada tingkat yang lebih abstrak yang berfungsi sebagai nilai etis. Akan tetapi, tidak berarti agama kehilangan signifikansinya dalam kehidupan duniawi. Sebagai sistem nilai, agama berfungsi memberikan arah dan orientasi serta makna hidup dan legitimasi terhadap tertib sosial.

Dalam pengertian inilah, Nurcholish melihat sekularisasi dalam kehidupan politik harus dilakukan, mengingat di satu pihak situasi politik Orde Baru menuntut adanya perubahan dalam tindakan dan perilaku emosi umat Islam, yang mana idealisme akan adanya integrasi merupakan sesuatu yang tidak realistis dan utopis, bahkan hanya akan membawa kepada kejumudan dan kemacetan pemikiran umat.<sup>102</sup> Di pihak lain umat Islam karena berbagai sebab, yang sudah tidak mampu lagi membedakan nilai-nilai yang Islami dengan nilai-nilai yang sudah melembaga yang disangka Islami, tapi sebenarnya tidak Islami, tidak lagi bisa membedakan mana yang transenden dan mana yang hanya bernilai temporal.<sup>103</sup>

Gagasan sekularisasi atau desakralisasi Nurcholish Madjid mengandung semangat demokratisasi, dan dalam konteks itu pula berimplikasi kepada penolakan terhadap gagasan partai Islam atau negara Islam. Sebab bagi Nurcholish, dengan adanya sekularisasi atau desakralisasi itu akan tercipta efek yang meruntuhkan monopoli dan konsentrasi kekuasaan melalui kontrol terhadap sistem simbolik keagamaan di tangan para

---

<sup>101</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan...* h.220

<sup>102</sup> Siti Nadroh, *Wacana...* h.174

<sup>103</sup> Ibid.

pemimpin partai.<sup>104</sup> Melalui proses tersebut, ia juga berharap terjadinya pemencaran kekuasaan yang memberikan dasar pembenaran bagi setiap orang (Muslim) untuk merasakan dirinya sebagai Muslim, sekalipun ia tidak pernah berhubungan dengan ideologi dan partai-partai yang secara formatik bersimbolkan Islam. Menurut Nurcholish, gagasan “Negara Islam” pernah muncul dengan kuat sekali di kalangan umat Islam pada masa-masa yang lalu adalah merupakan suatu bentuk kecenderungan apologetik. Apologi itu, menurutnya, tumbuh karena disebabkan dua hal.

*Pertama*, kemunculannya adalah apologi kepada ideologi-ideologi Barat (modern) seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain-lain isme (paham).<sup>105</sup> Invasi kultural berupa ideologi-ideologi tersebut direspon secara agresif yang bersifat ideologi politis yang menurut Nurcholish melahirkan pandangan yang berujung pada perjuangan Islam politik yang mencita-citakan terbentuknya “Negara Islam”. Dengan semangat apologi, Islam dipandang sebagai *al-dien*, yang dipahami sebagai ajaran yang serba meliputi atau ajaran multi dimensional yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik religius – spiritual dan bahkan aspek sosial kemasyarakatan yang mengkrucut kepada cita-cita negara Islam.

*Kedua*, legalisme, atau fiqhisme yang membawa sebagian kaum Muslimin ke pemikiran apologetik “Negara Islam” yang menggambarkan bahwa Islam itu adalah struktur dan kumpulan hukum. Dalam bahasa ringkas, Islam di pandang semata-mata sebagai struktur dan kumpulan hukum. Jadi konsep Negara Islam, dalam pandangan Nurcholish, adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara,

---

<sup>104</sup> Ibid. Dengan mengutip buku Fachry Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi Dalam Islam Indonesia*. (Surabaya: Risalah Gusti), 1996, h. 79-80

<sup>105</sup> Nurcholish Madjid, *Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia*”, dalam *Islam Keindonesia...* h.253

menurutnya, adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain yang berdimensi spiritual dan pribadi. Memang, masih katanya, agama dan negara tidak dapat dipisahkan, namun antara keduanya itu harus dibedakan dalam dimensi dan pendekatannya.<sup>106</sup> Bagi Nurcholish, Islam yang hakiki bukan merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum yang bisa melahirkan formalism agama, tetapi Islam sebagai pengejawantahan tauhid atau kekuatan spiritual yang mampu melahirkan jiwa yang *hanif*, inklusif, demokratis serta menghargai pluralism.<sup>107</sup>

## **2. Hubungan Islam dan Negara: Konsep Ideal untuk Indonesia Yang Plural**

Indonesia adalah salah satu bangsa yang pluralis di dunia. Dengan 18.100 pulau yang ada di wilayahnya, baik yang besar maupun yang kecil, yang dihuni maupun yang tidak, Indonesia juga negara kepulauan terbesar di dunia, dan negara dengan latar belakang beragam. Dengan sekitar 400 kelompok etnis dan bahasa yang ada di bawah naungannya, dan Indonesia juga adalah sebuah negara kebudayaan yang sangat heterogenetis.

Dilihat dari sudut pandang agama, Indonesia adalah bangsa Muslim paling besar di dunia. Kurang lebih 90 persen penduduk dari dua ratus tujuh puluh juta jiwa, beragama Islam. Tapi secara religio-politis dan ideologis, Indonesia bukanlah “negara Islam” Indonesia adalah negara yang didasarkan kepada ideologi resmi yang disebut Pancasila: (1) kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atau monoteisme (2) kemanusiaan Yang Adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan

---

<sup>106</sup> Ibid. h. 224-226

<sup>107</sup> Siti Nadroh, Wacana... h.180

perwakilan atau demokrasi (5) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia atau keadilan.

Menyadari kondisi negara Indonesia yang demikian heterogen itu, Nurcholish berpandangan sangatlah tidak tepat memaksakan Islam dijadikan sebagai agama resmi dan dasar negara dengan mengesampingkan agama-agama lain. Nurcholish berpandangan bahwa normativ religius; al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan definisi dan konsep operasional tentang mendirikan suatu negara berdasarkan Islam. Dalam konteks historis awal Islam pun tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengatakan kalau Nabi, selain menjalankan misi kerasulan, juga mengemban misi kekuasaan duniawi. Nurcholish Madjid mengutip Ibnu Taymiyyah, bahwa terbukti dengan kenyataan bahwa Nabi tidak menunjuk siapa pun sebagai pengganti beliau.

Menurutnya, lagi-lagi mengutip Ibnu Taymiyyah, hal itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul Allah. Bukan seorang yang mempunyai ambisi kekuasaan atau kekayaan yang jika bukan untuk dirinya, maka untuk keluarga dan keturunannya.<sup>108</sup> Alasan lain yang dikemukakan oleh Nurcholish, dengan mmenyebutkan sebagai salah satu ajaran pokok agama Islam, adalah cita-cita keislaman yang fitri yang sebenarnya sejalan dengan cita-cita manusia pada umumnya, maka tentunya cita-cita keislaman di Indonesia juga sejalan dengan cita-cita manusia Indonesia pada umumnya.<sup>109</sup> Artinya, seperti ditegaskannya sendiri, bahwa ia percaya betul akan kebaikan alami manusia. Oleh karena itu, masih katanya, bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia ini ialah sistem yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi juga akan membawa kebaikan bagi semua elemen masyarakat Indonesia.

---

<sup>108</sup>Nurcholish Madjid *Dalam Kata Pengantar Buku M. Iqbal Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: GMP, 2001)

<sup>109</sup>Nurcholish Mdjid. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta : Paramadina, 1999), cet ke-1 ,h. 52

Tentang konsep negara nasional, menurutnya tidak terlepas dari perjalanan sejarah. Dari perspektif Islam, perkembangan negara nasional nasional adalah sejenis saja dengan perubahan-perubahan dari masa khulafa al-Rasyidin ke dinasti Umayyah, berlanjut ke dinasti Abbasiyyah, dan seterusnya. “Jadi menurut saya”, kata Nurcholish, adanya negara nasional tidak apa-apa. Memang perkembangan sejarah menghendaki begitu. Kalau sekarang kita menolak negara nasional dan memaksakan secara universal atau negara imperial yang meliputi seluruh dunia Islam, jelas tidak mungkin, karena itu merupakan perjalanan sejarah.<sup>110</sup>Dengan alasan itu, menurut Nurcholish, kaum Muslimin Indonesia dapat menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan pertimbangan yang jelas. Kedudukan dan fungsi Pancasila UUD 1945 bagi umat Islam Indonesia sebenarnya mirip, walaupun tidak bisa disamakan, dengan kedudukan serta fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam; Piagam Madinah.

Konstitusi Madinah merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Muslimin di bawah pimpinan Nabi dengan kelompok-kelompok lain yang bukan Islam kota itu untuk membangun politik bersama.<sup>111</sup> Dalam kondisi itu, untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang dalam ilmu politik modern sekarang ini dikelanl dengan misalnya; tentang kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur kehidupan sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi dan politik antar golongan, kewajiban untuk berpartisipasi dalam pertahanan bersama, dan sebagainya.<sup>112</sup>

Selanjutnya ia berpendapat sebanding dengan sikap kaum Muslim Indonesia dalam menerima Pancasila dan UUD 1945,

---

<sup>110</sup> M. syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah kajian Politik Tentang Cendikiawan muslim Orde Baru..*(Jakarta: Paramadina,1995)cet. Ke-I,h.97

<sup>111</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik....Loc.Cit*

<sup>112</sup> M. Syafi’I Anwar,

orang-orang Muslim Madinah yang dipimpin Rasulullah saw. itu menerima konstitusi Madinah adalah juga atas pertimbangan nilai-nilainya yang dibenarkan oleh Islam dan fungsinya sebagai kesepakatan antar golongan untuk membangun masyarakat politik bersama.<sup>113</sup> Ia menjelaskan mengapa kaum Muslimin Indonesia dapat menerima Pancasila dan UUD 1945 karena dua hal: *pertama*, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran Islam; *kedua*, fungsinya sebagai *nuktab-buktab* kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama.<sup>114</sup>

Tetapi Nurcholish juga mengingatkan, ide yang lain orisinil dari Pancasila adalah bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka siapa saja dapat memberikan sumbangan tentang arti dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai sumber legitimasi politik dan mengandung cita-cita nasional yang tinggi, Pancasila, menurutnya tidak mungkin dibuat penjabarannya sekali untuk selamanya.<sup>115</sup>

Atas pemikiran tersebut, Nurcholish tidak risau ketika pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Keormasan (UU no 8/1985) yang antara lain menetapkan keharusan pencatuman Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi organisasi kemasyarakatan. Nurcholish melihat segi positif dari pemberlakuan undang-undang tersebut.

Ia menepis kekhawatiran sementara kalangan Islam yang melihat pemberlakuan undang-undang Keormasan akan mereduksi peranan agama. Menurutnya peranan agama akan tetap eksis dan terus ada, tetapi dimensinya akan menjadi lain dari peranan di masa lalu. Ia juga menjelaskan, setelah pemberlakuan undang-undang Keormasan, pemanfaatan simbolisme formal agama menjadi berkurang. Juga orang tidak lagi membicarakan mengenai, misslanya, negara Islam, akan tetapi orang-

---

<sup>113</sup>Ibid dan lihat Juga Ahmad Amir Aziz, *Neo Modernisme. Op.Cit*, h.45

<sup>114</sup> Ibid. h. 56-57

<sup>115</sup> M. Syafifi Anwar. h. 196.

orang akan membicarakan tentang cita-cita Islam mengenai kemasyarakatan. Jadi, jika orang bicara tentang demokrasi, lantas memperjuangkan demokrasi itu melalui persepsi agama Islam, dengan tidak mengucapakan secara eksklusif Islam. namun kalau hanya demokrasi yang diucapkan pada hal esensinya adalah sesuai dengan ajaran Islam maka akan bertemu dengan cita-cita golongan manapun yang punya keinginan sama terhadap tegaknya demokrasi.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> *Ibd.* H. 196

## **BAB IV**

# **KONFIGURASI HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: IMPLIKASI DARI GAGASAN DEPOLITISASI ISLAM NURCHOLISH MADJID**

### **A. Konfigurasi Hubungan Islam dan Negara: Implikasi Gagasan Depolitisasi Islam Nurcholish Madjid**

Di atas telah dijelaskan bagaimana pemerintah Orde Baru berusaha melakukan restrukturisasi dalam berbagai bidang, terutama yang menyangkut bidang ekonomi dan sosial politik. Pergolakan-pergolakan ideologi politik di era Orde Lama yang seringkali menimbulkan gejolak dan seringkali pula menciptakan ketidakstabilan kehidupan berskala nasional, di era Orde Baru, oleh pemerintah, diusahakan akan tidak berulang kembali. Pemerintah Orde Baru sangat paham benar, selama pertentangan ideologi politik masih terjadi, pembangunan di bidang apapun tidak akan pernah bisa terlaksana. Untuk itu pemerintah mencanangkan trilogi pembangunan berkaitan dengan tiga hal penting demi tercapainya pelaksanaan pembangunan untuk jangka panjang yaitu : tentang stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Untuk menindaklanjuti trilogi pembangunan itu kemudian pemerintah Orde Baru menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (PELITA) yang dimulai pada tahun 1969, merupakan langkah besar yang dimaksudkan untuk merealisasikan program pembangunan secara bertahap.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup>Fachry Ali, et.al, *Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*, (Bandung; Mizan,



Hadirnya pemerintah Orde Baru dengan gagasan pembangunan nasionalnya itu, berkaitan erat dengan munculnya isu demokrasi. Dan bahkan oleh pemerintah, modernisasi dijadikan sebagai tema sentral menggantikan tema revolusi di masa Orde Lama.<sup>118</sup> Karenanya, tidaklah aneh jika kemudian istilah modernisasi merupakan simbol legitimasi politik.

Isu modernisasi sudah merambah di semua bidang kehidupan, dan persoalan agama juga tentunya tidak bisa dihindarkan dari modernisasi. Yang menjadi persoalan serius bagi umat Islam adalah bagaimana melihat modernisasi itu dari sudut pandang Islam. Tegasnya apakah modernisasi beserta kebijaksanaan pembangunan nasional yang berorientasi ke program dan bersifat pragmatis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi itu tidak menimbulkan implikasi negatif terhadap umat kehidupan Islam? Bagaimana jika modernisasi itu berimplikasi dan membawa kepada ajaran pemisahan agama dan negara (sekularisme) serta menyemai benih-benih westernisasi?

Tapi kenyataan selanjutnya umat Islam melakukan protes ketika mereka tidak diberikan kebebasan menyalurkan aspirasi politik mereka.<sup>119</sup> Selain itu umat Islam juga melakukan reaksi keras ketika mereka menyadasi bahwa gagasan modernisasi secara langsung berhubungan dengan dasar-dasar doktrial Islam.

Muncul reaksi keras dari kalangan Islam terhadap isu modernisasi yang diduga membawa unsure-unsur sekularisasi, telah menempatkan umat Islam pada posisi Islam pada posisi resisten dan kurang terlibat dalam proses pembangunan.

---

<sup>118</sup>Peta pembangunan semasa Orde Lama terpusat di bidang politik, sementara rezim Orde Baru muncul political will untuk menciptakan orde politik yang sama sekali berbeda dengan orde politik sebelumnya, maka dinamakan Orde Baru. Format politik Orba ini mencoba menciptakan keseimbangan antara konflik dan consensus, walaupun dengan cara menekannya dan bahkan “membunuhnya”.

<sup>119</sup>Terbukti dengan tidak direhabilitasinya Partai Masyumi oleh pemerintah dan dibatasinya gerak langkah bekas pemimpin Masyumi.

Kurang terlibatnya kaum Muslimin dalam proses pembangunan membuat pemerintah Orde Baru mencari patner lain dalam melaksanakan pembangunan, mereka yang berasal dari intelektual sekuler, dari kalangan Kristen, dan dari kalangan sosialis.<sup>120</sup> Kenyataan itu membawa kita, kata Fachry dan Bahtiar, pada kesimpulan bahwa, baik dilihat dari dimensi politik (kekuasaan) maupun pembangunan (modernisasi), umat Islam berada pada posisi marjinal.<sup>121</sup>

Adalah Nurcholish Madjid orang yang paling cemas dan gelisah melihat kondisi umat Islam sedemikian rupa. Umat Islam sebagai mayoritas dari dimensi kuantitas, tapi minoritas dari sudut partisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Di tengah kerisauan menyaksikan ketidakadilan yang berujung pada peminggiran umat Islam oleh pemerintah Orde baru itulah Nurcholish, walaupun bukan yang pertama dan satu-satunya, menawarkan ‘pemikiran baru’ (atau lebih cepat menggunakan istilah “pembaharuan pemikiran”) terhadap berbagai aspek ajaran Islam. gagasan-gagasan Nurcholish semenjak 1970-an semakin menemukan lahan subur sebagai tempat persemayamannya di kalangan masyarakat kelas menengah Islam. Respon terhadap ide pembaruan Nurcholish Madjid pun beragam. Hal itu disebabkan karena ide-ide pembaruan itu bersangkutan langsung dengan doktrin dasar Islam. Namun, sebagaimana telah disinggung dalam bab satu, bahwa gagasan yang paling banyak menyulut perdebatan adalah wacana tentang perlunya melakukan sekularisasi terhadap pemikiran Islam. ide kontroversi Nurcholish; sekularisasi dan desakralisasi itu berujung pada penegasan negara Islam dengan semboyan yang terkenal “Islam Yes, Partai Islam No,”. Esensi dari semboyan ini adalah bahwa Islam tidak memiliki konsep kenegaraan dan tidak pula mewajibkan umatnya untuk membentuk negara yang

---

<sup>120</sup> Fachry Ali, *Ibid.* h. 109

<sup>121</sup> *Ibid.*

berlabel Islam. Dalam pandangan Ahmad Tafsir, substansi dari semboyan “Islam Yes,!Partai Islam NO! Nurcholish ini adalah *cultural approach* (pendekatan kebudayaan) dalam artian cita-cita Nurcholish untuk melakukan Islamisasi atau ‘membumikan’ Islam di Indonesia secara budaya.<sup>122</sup> Tapi, dari slogan itu, sesungguhnya, nilai etika Islam diharapkan memainkan peranan yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai seperti keadilan, demokrasi, berbuat baik (ihsan) dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar, adalah juga nilai kemanusiaan yang suci (fitr) dan karena itulah nilai-nilai itu bisa diterima oleh semua elemen bangsa yang berbeda bahasa, budaya dan yang lebih sensitiv dan krusial lagi agama.

Banyak para pakar menyebutkan walaupun secara politik, Islam termarginalisasi oleh dua rezim pemerintahan, Orde Lama dan diteruskan oleh Orde Baru, namun di balik itu semua ada hikmah besar yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh politisi polisi Islam ketika itu yaitu meningkatnya kesadaran orang-orang Islam akan pentingnya memahami dan mengembangkan Islam dari dimensi lain seperti dimensi sosial budaya dan ekonomi. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menghayati dan melaksanakan ajaran-ajaran agama disertai meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat Islam, tentu berimbas pada meningkatnya orang-orang Muslim yang berpendidikan. Pada generasi inilah Nurcholish menanamkan pembaharuan dan kelak jadi pendukung utama gagasannya.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup>Ahmad Tafsir. *Posisi Nurcholish Madjid Dalam Pembangunan Pemikiran Islam Indonesia, Dalam Jalaluddin Rahmat, et.al, Thariqat Nurcholishshy*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), cet.ke-1 h. 74

<sup>123</sup>Walaupun Nurcholish bukanlah orang yang pertama yang memelopori akan pentingnya pembaruan pemikiran Islam, terutama dalam kaitannya dengan hubungan Islam dan negara. Orang pertama yang menyuguhkan solusi tentang persoalan Islam dan modernisasi adalah Deliat Noer ketika beliau menulis essay untuk menjawab kegagalan masyarakat Islam, terutama Islam Politik, tentang modernisasi yang berjudul “Untuk Islam dan Masalah Modernisasi” Namun pemikiran-

Hemat penulis orang pertama dan paling berjasa dalam mencairkan kemandegan dan dalam ungkapan lain “kemampuan umat Islam” adalah berkat usaha Nurcholish Madjid, Gusdur, dan lain sebagainya. Walaupun judul gagasan mereka berbeda, namun tema sentralnya sama yaitu bagaimana Islam yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia dapat menjadi mercusuar yang akan selalu menerangi setiap penjuru bumi Indonesia dan setiap tarikan dan hembusan nafas umat Islam Indonesia selalu mencerminkan nilai-nilai Islam yang dianut tanpa perlu mengekspos dengan cara legal-formal (negara Islam). Dan perlu juga dicatat bahwa Islam yang ingin ditumbuhsurburkan itu sesuai dengan konteks keindonesiaan. Fachry dan Bahtiar mencatat bahwa ‘pemikiran baru’ itu timbul dari gagasan Nurcholish yang kata mereka, oleh Kamal Hassan dilukiskan sebagai seorang Intelektual muda Muslim yang berpikiran realistis akomodasionis, yang lebih bersifat mengelaborasi pikiran-pikiran Islam dalam hubungannya dengan masalah-masalah modernisasi sosial politik umat Islam Indonesia kontemporer dan lebih bersifat empirik.<sup>124</sup> Sekalipun mengandung kontroversi, pemikiran baru Nurcholish itu mencerminkan rumusan empirik tentang bagaimana mengembalikan daya gerak psikologis umat yang telah hilang. Karenanya pemikiran baru itu tidak mengesankan apologetik.<sup>125</sup>

Sebelum Nurcholish tampil dengan gagasan-gagasan kontroversialnya, sudah pernah muncul orang-orang yang merasa risau dengan kondisi umat Islam yang termarginalisasi dan dimusihi oleh pemerintah, seperti Deliar Noer, Zakiah Darajad, Maftuchah Yusuf, Rasyidi, dan banyak lagi tokoh

---

pemikiran Deliar Noer hanya sampai pada tahapan teoritis dan tidak bersifat empiris. Nurcholishlah yang memulai dan mengembangkan gagasan tentang perlunya umat Islam berperan serta dalam melakukan pembangunan dan sialah, hemat penulis, yang paling menonjol.

<sup>124</sup> Fachry dan Bahtiar, *op.cit*, h.123

<sup>125</sup> *Ibid*.

lain.<sup>126</sup> Tapi usaha-usaha yang mereka lakukan masih dalam lingkaran teoritis dan intelektual, belum memberikan jawaban-jawaban yang pasti dan tegas tentang bagaimana seharusnya persepsi keislaman dirumuskan dalam era modernisasi. Pikiran dan gagasan mereka pada dasarnya hanya sampai pada suatu kesimpulan bahwa Islam tidak bertentangan dengan modernisasi dan sebenarnya cita-cita modernisasi adalah juga cita-cita Islam. suatu pandangan yang tidak jauh berbeda dengan kelompok Islam yang lebih senior seperti M. Natsir, M. Roem, Zainal Abidin Ahmad, Hamka, dan tokoh-tokoh yang lain.<sup>127</sup>

## **B. Bangkitanya Kesadaran Intelektual Pasca Berkembangan Pembaharuan Pemikiran Islam**

Berkembangnya gagasan depolitisasi Islam (yang dilakoni Nurcholish Madjid dengan semboyan “Islam, Yes! Partai Islam, No!) membangkitkan kesadaran kalangan generasi Muslim tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang heterogen dan multi dimensi. Mereka sadar-sesadarnya, bahwa Islam tidak boleh diposisikan berhadapan dengan Pancasila. Bahkan Pancasila dan agama saling melengkapi demi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara yang paling ampuh. Mengingat bahwa Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa dengan cara menelaah dan meneliti dengan secara seksama akan semua dimensi kehidupan semua elemen bangsa. Dan yang paling penting, bagi mereka, adalah Pancasila itu sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an dan hadith dan bahkan Pancasila itu sesungguhnya adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Karena itu sebagian dari mereka menganggap bahwa sebagai ideologi negara, Pancasila adalah bentuk final. Dan

---

<sup>126</sup> Ibid. h. 155

<sup>127</sup> Ibid.

karenannya tidak relevan lagi membicarakan tentang negara Indonesia seharusnya berdasarkan Islam. yang lebih penting adalah mengawasi penafsiran-penafsiran terhadap ideologi negara itu dan sekaligus “menggaraminya” dengan nilai-nilai Islam. Islam, bagi mereka, akan lebih pas jika difungsikan sebagai landasan etis dalam berpolitik, daripada berperan sebagai ‘bendera’. Dengan kesadaran itu diharapkan kembalinya peran umat Islam sebagai mayoritas untuk mengisi kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan dengan pembangunan yang bermanfaat bagi masa depan dan anak cucu mereka kelak.

Sejak saat itu, dengan penuh antusiasme, anggota-anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan, terutama para alumninya, menceburkan diri dalam kancah pembangunan Orde Baru. Proses reproduksi sistem politik, partai-partai politik dan aktivis, serta reproduksi sosial ekonomi yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru merekrut potensi-potensi tenokrat dan intelektual HMI ini ke dalamnya. Sebagian besar mereka masuk ke dalam birokrasi pemerintahan sebagai birokrat, sebagian lagi masuk ke dalam badan perencana pembangunan sebagai perencana. Di samping itu banyak dari organisasi Mahasiswa Islam itu yang masuk ke dalam partai politik seperti Golkar dan PDI. Ada pula yang terjun dalam dunia usaha dan tidak sedikit yang masuk dunia birokrasi (pemerintahan). Dengan demikian, perlu dicatat di sini, bahwa ide-ide yang dilontarkan oleh kelompok Nurcholish Madjid dan kalangan pembaru memberikan legitimasi keagamaan atas kelompok Islam terdidik yang baru bangkit.<sup>128</sup> Dalam kategori ini dapat penulis sebutkan beberapa nama seperti Prof. Bambang Pranowo, Fachry Ali, M. Wahyu Nafis, Komaruddin Hidayat, Akbar Tanjung, dan sekian banyak lagi tokoh-tokoh yang lain.

Penulis akan mengungkapkan betapa gagasan Nurcholish, yang dulunya dianggap sangat kontroversial, kini

---

<sup>128</sup> Fachry et.al, Ibid.h.160.

sudah tumbuh subur. Tak kurang dari Amien Rais, seorang tokoh Islam kelas Wahid,<sup>129</sup> Dr. Ilmu politik lulusan Chicago University, yang pada tahun-tahun awal Nurcholish Madjid menggagas Sekularisasi, adalah sebagai penentang kelas utama. Kata Amien, “kehidupan politik yang Islami tidak memberikan tempat bagi sekularisasi, walaupun bagi sebagian orang sekularisasi dinggap sebagai proses yang mau tidak mau harus membarengi modernisasi.<sup>130</sup> Amien juga adalah seorang tokoh yang menginginkan ditetapkannya syariat Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia.<sup>131</sup> Tapi se kembalinya dari Amerika, Amien kemudian berubah secara total. Hal itu terbukti ketika dia diwawancarai oleh Majalah Panji Masyarakat no. 379 tahun 1982, juga tertuang dalam buku *Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid- Mohammad Roem*, katanya,” ....*Islamic State* atau negara Islam, saya kira tidak ada dalam al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan negara Islam...” Dan secara ril ketika reformasi bergulirpun, Amien membentuk partai lintas agama, PAN. Adian Husaini, dengan bahasa yang agak sedikit sinis, menyebutkan berdirinya PAN menunjukkan perubahan sikap Amien Rais, seorang tokoh yang dulu sangat kental keislamannya. Bahkan, katanya, Amien, oleh banyak kalangan dikategorikan sebagai “fundamentalis’, suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjuk orang yang bersikap keras dan ‘kasar’ dengan pemahaman agama secara tektual. Ia, masih kata Adian, penentang keras gagasan sekularisme dan sekularisasi dan Zionisme. Bahkan William R. Liddle sempat dijulukinya

---

<sup>129</sup>Walaupun sebenarnya Amien bukanlah intelektual generasi baru, sebab tahun 1981 Amien sudah meraih gelar Doktor dari Universitas Chicago, AS, sedangkan Nurcholish Madjid, baru pada tahun 1984, yang saya maksud adalah generasi dengan pola pikir baru.

<sup>130</sup> Adian Husaini, Amerika-Amien Rais.....op.cit.h.84.

<sup>131</sup> Lihat Ibid. h. 88-89

sebagai ‘Yahudi Tengik’.<sup>132</sup> Untuk lebih membuktikan bahwa perubahan sikap Amien itu ada peran besar Nurcholish Madjid, Hajriyanto Y. Thohari, melukiskan keterkejutan Nurcholish ketika membaca perubahan sikap Amien Rais yang memuat wawancara dengan Amien Rais tentang negara Islam dalam Panji Masyarakat, Nurcholish Madjid yang saat itu sedang studi di Chicago, terkejut luar biasa. Ia (Nurcholish), membawa majalah Panjimas itu kepada A. Syafii Maarif, ketika itu ia juga tengah belajar di Chicago. Nurcholish sangat terkejut, bahkan sempat terpikir jangan-jangan wartawan Panjimas salah kutip, atau Amien (Rais) silap lidah atau keseleo. Namun sampai beberapa waktu berselang tidak ada koreksi dan klarifikasi dari Amien, malah muncul tanggapan M. Roem yang mendukung statement Amien itu di Panjimas edisi berikutnya, Nurcholish menyatakan kelegaannya dan rasa bangganya.<sup>133</sup> Karena betapa orang tahu bahwa Amien adalah penentang keras ide sekularisasi Nurcholish, Hijriyanto menambahkan, ‘Kini ketika Dr. Amien Rais mendirikan PAN, Cak Nur pasti lebih haru lagi, kalau bukannya malah tersenyum bangga penuh kemenangan’. Gagasannya tentang Islam yes; Partai Islam, No, lagi-lagi dibenarkan oleh seorang Amien Rais 28 tahun kemudian. Malah bukan hanya dibenarkan, tetapi juga diimplementasikan oleh seorang Amien Rais, tokoh Islam kelas satu dan salah satu wakil terbaik Islam modernis.’<sup>134</sup>

Satu paragraph terakhir Hajriyanto itu dengan jelas sekali melukiskan bahwa perubahan sikap Amien itu ada kaitannya dengan ide-ide kontroversi Nurcholish Madjid.

Sementara sikap politik Amien pun semakin jelas. Dalam bahasa Hajriyanto, Amienlah yang mengaplikasikan gagasan Islam, Yes! Partai Islam, No. gagasan-gagasan itu diadopsinya,

---

<sup>132</sup> *Ibid.* h. 79

<sup>133</sup> Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, (Jakarta: Kompas, 2001) cet. Ke-1, h.55-59

<sup>134</sup> *Ibid.*



tentunya, ketika ia melihat betapa umat Islam terpinggirnnya dalam segala hal kecuali kebodohan dan keterbelakangan. Jalan terbaik, tidak ada lain kecuali melakukan “politik garam” (melawan ‘politik gincu yang selama ini didengungkan sebagian kalangan Islam, termasuk dirinya) agar umat Islam dapat eksis dan tidak menjadi penonton di “kandang sendiri”<sup>135</sup> Sikap untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara (dan tentunya menolak ideologi-ideologi lainnya, termasuk Islam) itu semakin dipertegas Amien ketika ia berada di Surabaya, sesaat sebelum berkunjung ke makam Bung Karno dalam rangka ziarah. Ia mengatakan, “Motivasi umat Islam yang mayoritas itu menjadi terparife-ralisasi dan tidak memiliki kontribusi terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Dan bahkan dianggap sebagai beban yang maha berat dikarenakan mereka mayoritas. Kini setelah 33 tahun melancarkan program pembaharuan, Nurcholish menilai sendiri kinerjanya sebagai berhasil, terutama membuat politik menjadi relativ. Ketika diwawancarai Majalah Panjimas tentang statemennya; “Islam yes, Partai Islam, No, Panjimas menyebutkan bahwa slogan itu dimanfaatkan betul oleh pemerintah Orde Baru dan karenanya kebijakan depolitisasi dan deideologisasi bisa dikatakan sangat sukses. Nurcholish menjawab “itu saya tidak tahu. Tetapi kalau depolitisasi rakyat, dalam arti membuat politik menjadi relativ, itu benar. Karena, waktu itu politik menjadi mutlak, harga mati, seolah-olah ada kaitannya dengan surga dan neraka. Itu kan jadi enggak betul, jadi, dicairkan dulu...”<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup>“Menjadi penonton di kandang sendiri”. Ungkapan ini penulis gunakan mengingat bahwa masih melekat dalam ingatan bahwa agama Kristen disebarkan dengan cara dipaksa penjajah colonial Portugis dan Belanda. Oleh karena itu, sampai kini penganut Kristen dianggap sebagian orang Muslim adalah ‘warga penjajah’ bukan dari bagian “warga yang terjajah”, bangsa Indonesia.

<sup>136</sup>Nurcholish Madjid, ‘Justru yang saya lakukan, itulah yang dikehendaki Natsir,’ Panjimas, No. 13 tahun 1 9Juni 2003),h 40-41

Bahtiar Efendy juga mengakui adanya perubahan besar pada umat Islam dalam melihat hubungan Islam dan negara. Perubahan itu dimulai pada akhir 1980-an. Kaum Muslimin Indonesia, katanya, sudah dapat menerima kenyataan bahwa Indonesia bukan negara agama (tepatnya negara Islam) dan bukan pula negara sekuler.<sup>137</sup> Kenyataan bahwa ketika rezim Orde Baru runtuh yang kemudian diikuti euporia kebebasan pendirian partai-partai yang mengatasnamakan dirinya partai Islam pun bermunculan. Tapi untuk menggeneralisasi seluruh partai Islam yang ada itu sebagai mendukung penerapan syariat Islam atau Islam sebagai dasar negara, jelas salah dan menyesatkan. Partai-partai Islam yang ada tidak dapat dipandang sebagai entitas yang serba sama atau monolitik.

Dengan kenyataan itu, menarik untuk dicatat bahwa dukungan untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam konstitusi adalah minimal jika dibandingkan dengan partai Islam atau partai yang berbasis masa Islam yang ada. Lebih dari sepuluh partai Islam di parlemen, hanya PPP, PBB dan PNU yang mendukung maksudnya Piagam Jakarta ke dalam Konstitusi baru.<sup>138</sup> Selain bahwa suara yang diperoleh oleh partai-partai Islam memang sangat minim. Dari 20 partai Islam dan partai berbasis massa Islam yang berpartisipasi dalam pemilu 1999, hanya 10 partai yang memperoleh satu kursi atau lebih dalam parlemen. Partai-partai yang mendapat suara itu ialah PPP (58 kursi), PKB (51 kursi), PAN (34 kursi), PBB (13 Kursi), PK (sekarang PKS) (7 Kursi), PPII Masyumi (1 kursi), dan PKU (1 kursi).<sup>139</sup> Sekali lagi, hasil pemilu 1999 mengindikasikan bahwa meski merupakan fakta bahwa mayoritas Indonesia adalah Muslim, partai Islam tetap tidak dapat menghimpun dukungan mayoritas umat Islam. kenyataan itu

---

<sup>137</sup> *Ibid. h. 113*

<sup>138</sup> Untuk mendiskusikan masalah ini lebih dalam lagi, lih. *Ibid.*, h.113

<sup>139</sup> *Ibid.*

diakui Nurcholish sebagai telah terjadi pergeseran yang besar dalam pandangan politik umat Islam, di mana umat Islam lebih menekan substansi daripada simbol kosong.<sup>140</sup> mereka sadar bahwa untuk menyalurkan aspirasi mereka tidak mesti dari partai Islam. Masuknya sejumlah pemikir dan aktivis Muslim ke partai-partai non Islam, seperti Golkar, PDI-P, dan lain-lain adalah karena perspektif ini. Dalam konteks demikian, Golkar, PDIP, dan partai yang bukan partai Islam, merupakan pihak-pihak yang paling diuntungkan. Sebaliknya, dalam banyak hal, kecenderungan di atas sangat merugikan partai-partai Islam. Meskipun tidak bermaksud menjauhkan konstituen Islam dari partai Islam, jargon “Islam, yes, Partai Islam, No”. (slogan yang dipakai Nurcholish Madjid dalam rangka depolitisasi rakyat) berperan aktif melemahkan ikatan-ikatan emosional komunitas Islam dengan Partai Islam.<sup>141</sup>

Konsekuensi dari kesadaran akan relativisasi politik, membawa dampak yang positif bagi sebagian besar umat Islam. Salah satunya dari sekian banyak hal yang umat terasa adalah telah terjadi transformasi dari eksklusivisme kepada inklusivisme Islam, terutama di antara umat Islam sendiri. Kata ‘umat’ misalnya, yang di masa lalu (sebelum terjadi transformasi) mengandung arti *community*, komunitas masyarakat (Islam) dalam arti sempit. Kata ini hanya dapat diidentifikasi kepada mereka yang berafiliasi ke partai-partai Islam, ormas-ormas Islam, atau lembaga keagamaan Islam, maka sekarang, ‘umat Islam’ didefinisikan sebagai *society*, masyarakat dalam arti luas, yakni siapa saja yang menganut agama Islam tanpa mempersoalkan aliran politiknya.<sup>142</sup>

Sejalan dengan perubahan konsep ‘umat’, konsep ‘aspirasi umat’ pun mengalami pergeseran makna yang signifikan

---

<sup>140</sup> *Ibid. h. 115*

<sup>141</sup> Bahtiar Efendy, *Repolitisasi.....op,cit,h. 239*

<sup>142</sup> Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1993) cet, ke 1, h.6

dengan sendirinya. Jika dahulu aspirasi itu lebih dekat pada gagasan negara Islam, maka sekarang aspirasi itu menghendaki ditegakkannya sistem kehidupan yang rasional dan empiris, seperti perlunya ditegakknya demokrasi dan keadilan di segala bidang kehidupan umat. Karenanya, sarana penyaluran aspirasi berubah pula tidak terbatas pada organisasi politik dan parlemen, tapi semua lembaga sosial yang menunjang terwujudnya demokrasi dan keadilan.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> *Ibid.*



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui beberapa hal penting yang menjadi pokok pembahasan. *Pertama*, dari uraian yang telah dipaparkan di muka, penulis berkesimpulan bahwa masalah hubungan Islam dan negara ada sejak adanya agama Islam. dan selama itu pula hubungan antara keduanya menunjukkan pola beragam. Di era Nabi dan para sahabat khulafa al-Rasyidin hubungan Islam dan negara bersifat integral. Di mana Islam adalah aturan dan hukum-hukum yang mengikat seluruh umatnya. Sedangkan negara adalah sebagai sarana untuk menjalankan hukum-hukum dan aturan itu. Setelah era Nabi dan para sahabatnya berlalu, hubungan yang bersifat integral sudah tidak ditemui lagi, termasuk Indonesia.

*Kedua*, Nurcholish, disebabkan kuatnya tuntutan modernisasi dan alasan kemajuan bangsa Indonesia, manafikan pernah ada hubungan yang saling menyatu antara Islam dan negara. Dalam pandangannya ia berkesimpulan bahwa Islam tidak memberikan landasan teoritis bagi umat Islam untuk mendirikan negara. Jelasnya tidak ada pemerintah agama untuk mendirikan negara dan di era Nabi dan sahabat Khulafa al-Rasyidin pun tidak ada contoh tentang penyatuan antara Islam dan negara. Wacana yang berkembang di sekian banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim hanyalah karena mereka (kaum muslimin) mencari alternative dari jajahan ideologi dan budaya Barat seperti sosialisme, liberalism, sekularisme, dan sebagainya yang menimbulkan kekhawatiran tokoh-tokoh Islam. Sebagai jawaban dari jajahan itu kemudian mereka mendeklarasikan negara Islam (yang dibahasakan Nurcholish sebagai apologetic). Diskursus tentang negara Islam ini kemudian menjadi polemik di hampir setiap negara berpenduduk mayoritas Muslim, tak terkecuali Indonesia. Sudah penulis sebutkan di muka, bahwa babakan besar sejarah Indonesia modern hanya dihiasi oleh ketegangan dan polemik di antara dua entitas elemen penting bangsa; pemerintah (yang sebagian besarnya juga adalah Islam) di satu pihak dan umat Islam di pihak lain.

*Ketiga*, Implikasi dari gagasan Nurcholish, seperti telah penulis uraian di muka, dapat disebut cukup berhasil, walaupun tidak dapat disebut sangat berhasil. Sebab suatu paham tidak akan pernah sirna dari muka bumi. Apalagi dalam kasus hubungan Islam dan negara karena setiap akan lahir dari generasi Islam yang berpandangan bahwa Islam dan negara tidak bisa dipisahkan. Nurcholish hanya berhasil meredam gejolak dan merubahh pandangan itu dari sebagian kalangan. Indikasi keberhasilan di era 1970-an sampai era reformasi orang-orang yang memperjuangkan bersatunya Islam dan negara tidak sehebat dan segencar mereka di era pasca kemerdekaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan terjemahan*, Depag RI, 1971

Amir, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia, Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: PT Renika Cipta, cet. 1999. Ke-1

Ali, Fachry, et.al, *Merambah Jalan baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, TT

Ali, Mukti, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta; Djambatan, 1994

Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina: Grafiti, 1995

Bellah, Robert. M. *Beyond Believe, Esei –Esei Agama di Dunia Modern*, Jakarta: Paramadina, 2000, cet ke -1

Djaelani, Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995

Efendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta; Paramadina 1998, cet ke -1

, *repolitisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik*, Bandung: Mizan, 2000, cet ke – 1

Esposito, hon. L, *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2001, jilid 6

Hassan, Muhammad Jamal, *Modernisasi Indonesia, Respon Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Lingkungan Studi Islam (LSI) 1987

Husaini, Ardian, Amien Rais, *Dalam Kancab Konflik Peradaban*, Jakarta: Global, 1999, cet. Ke 1

Iqbal, M, Fiqih, *Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: GMP, 2001

Kamaruzzaman Relasi Islam dan Negara, *Perspektif fundamentalis & Modernis*, Magelang; Indonesia Tera, 2001, cet ke-1

Lapidus, M. *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 1999 Bagian III

Madjid Nurcholish, *Cita-Cita Politik Islam Era REformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999, cet. Ke-1



- , *Islam Kemordenan dan Keindonesiaan*, Bandung; Mizan, 1998, cet XI
- , *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta; Paramadina, 1998, cet ke-1
- , *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta; Paramadina, 2000, cet ke -1
- , *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta; Paramadina, 1997, cet ke -1
- , *Membangun Oposisi, Menjaga Momentum Demokrasi*, Jakarta Volce Center Indonesia, 2000.
- , *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 2000. Cet IV
- Maarif, Ahmad Syafii, *Peta Bumi Intelektul Muslim Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.
- Najib, Muhammad, *Melawan Arus Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais*, TT. PT. Serambi Ilmu, 1999, cet. I
- Nadroh, Siti, *Wacana Keagamaan Dan Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, cet. Ke 1
- Nasution, Harun, et. al, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985, cet. Ke 1
- , *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Natsir, Muhammad, *Agama dan Negara, Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Media Da'wah, 2001.
- Rais, dhiyauddin, (Terj). *Teori Politik Islam*, Jakarta: GIP, 1999
- Rahmat, Jalaluddin, et.al, Thariqat Nurcholishy, *Jejak Pemikiran dari Pembaharuan Sampai Guru Bangsa*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001, cet ke-1
- Sentosa, Edi Aguss, *Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid –Mohammad Roem*, Jakarta; Djambatan, 1997
- Sani, Abdul, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, cet. ke-1

- Syamsudin, M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001, cet, ke 1
- Syazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Penerbit UI Pres, 1993, Edisi ke-5
- Syam, Firdaus, *Amien Rais dan Yusril Idris Mahendra, di pentas Politik Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003, cet. ke 1
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi*, 1963, cet. ke 2
- Suhelmi, Ahmad, *Soekarno Versus Natsir, Kemengan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, Jakarta: Darul Falah, 1999, cet, ke-1
- Thaba, *Abdul Aziz, Islam dan Negara dalam Politik Orde baru*, Jakarta; GIB, 1996, cet. ke 1
- Tebba, Sudorman, *Islam Orde Baru: Perubahan Politik Keagamaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993. Cet. ke-1
- Majalah: *Panjimasyarakat*, Juni 2003 no. 13 tahun 1

## DAFTAR GLOSARIUM

- fitrah : Dari segi bahasa, kata fitrah terambil dari akar kata al-fathr yang berarti belahan, dan dari makna ini lahir makna-makna lain, seperti " penciptaan " dan "kejadian"
- kaffah : Muslim yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam di setiap aspek kehidupan
- spritual-individual : Cara Pandang Masing-masing Individu
- nasionalis-sekuler : kekuatan atau kelompok politik yang mengintegrasikan gagasan nasionalisme Indonesia dengan ide-ide sekulerisme, memisahkan antara urusan keagamaan dengan kegiatan kenegaraan
- mutual-simbiosis : interaksi yang erat serta khusus antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis tetapi saling menguntungkan bagi kedua pihak
- BPUPKI : Badan Penyelidik Untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia
- Khulafa Arrasyidin : pemimpin yang mendapat petunjuk Allah SWT dan sangat arif bijaksana.
- Khalifah : pengangkatan seseorang sebagai pemimpin. Gelar khalifah diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW
- al-Qur'an : Kitab Suci yang merupakan pedoman hidup untuk umat Islam
- Hadist : kata, bertindak, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang digunakan sebagai dasar hukum Islam. Hadis digunakan sebagai sumber hukum Islam di samping al-Qur'an, hadits posisi dalam hal ini adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.
- kaum Muhajirin : orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah demi menyelamatkan iman dan agama mereka

Anshor	:	penduduk Madinah yang pada masa kerasulan ridho menerima kedatangan orang-orang muhajirin yang terpaksa meninggalkan kota kelahiran mereka tercinta yaitu Mekah untuk menuju Madinah
konstruktif	:	sesuatu yang bersifat membangun, membina, memperbaiki
relatif	:	sesuatu yang tidak mutlak. sesuatu yang membutuhkan perbandingan atau acuan untuk dapat menentukan nilainya
konsultasi	:	Pertukaran pikiran ataupun meminta pendapat
aklamasi	:	pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara
ahli syuro	:	orang yang percaya atau di tunjuk untuk mewakili rakyat menyelesaikan urusan tertentu
Legislatif	:	sebuah lembaga negara yang mempunyai tugas untuk menyusun dan juga membentuk peraturan perundang-undangan
Eksekutif	:	salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum
defacto	:	ungkapan yang berarti "pada kenyataannya (fakta)" atau "pada praktiknya". Dalam hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktik yang sudah terjadi, meski hal tersebut tidak diakui secara resmi di mata hukum
khazanah	:	Khazanah / kha·za·nah / n 1 barang milik; harta benda; kekayaan; 2 kumpulan barang; perbendaharaan; 3 tempat menyimpan harta benda (kitab-kitab, barang berharga, dan sebagainya); Kamus Besar Bahasa Indonesia

yuridis	:	Menurut Hukum, secara hokum, Bantuan Hukum
Arus Modernisasi	:	proses menuju masa kini. Dalam ilmu sosiologi, modernisasi dapat juga diartikan sebagai suatu proses perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menuju ke masyarakat yang lebih maju atau modern
rasionalitas	:	konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan seseorang alasan untuk percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak
Plural	:	Beragam
perspektif	:	Cara pandang terhadap sesuatu masalah, 37,47,50,51
simbolisme formal	:	Tanda penghargaan resmi, 39
demokrasi	:	Kebebasa Individu dalam mengambil keputusan Hidup

## DAFTAR INDEKS

### A

- ahli syuro ..... 14, 77  
aklamasi ..... 6, 10, 77  
al-Qur'an.... 5, 12, 22, 24, 34, 40,  
53, 62, 64, 76  
Anshor..... 6, 77  
Arus Modernisasi..... vii, 34, 78

### B

- BPUPKI ..... 2, 76

### D

- defacto..... 19, 78  
demokrasi 24, 28, 51, 52, 55, 57,  
60, 69, 78

### E

- Eksekutif..... 19, 77

### F

- fitrah..... 1, 76  
formal..... 29, 50, 55, 61, 78

### H

- Hadist ..... 76

### K

- kaffah ..... 1, 76  
kaum Muhajirin ..... 5, 77

- Khalifah...vii, 5, 9, 15, 20, 21, 76  
khazanah..... v, 33, 34, 47, 78  
Khulafa Arrasyidin ..... 5, 76  
konstruktif ..... 7, 77  
konsultasi..... 9, 77

### L

- Legislatif ..... 19, 77

### M

- mutual-simbiosis ..... 2, 76

### N

- nasionalis-sekuler ..... 2, 76

### P

- perspektif..... 53, 68, 78

- Plural**..... 52, 78

### R

- rasionalitas ..... 48, 49, 78  
relatif ..... 8, 77

### S

- simbolisme..... 55, 78  
spritual-individual..... 2, 76

### Y

- yuridis..... 33, 78

# POLITIK ISLAM

Perspektif Nurcholish Madjid  
Serta Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Intelektual Islam  
Indonesia

Banyak orang menyebut Indonesia beruntung dengan memiliki ilmuan selevel Nurcholish Madjid. Kehadiran Nurcholish Madjid di panggung pemikiran politik Indonesia bisa merubah peta politik dari yang selama tiga puluh tahun sebelumnya memperpentangkan konsep negara dengan Islam hingga menjadikan politik sejalan dengan Islam sehingga tidak lagi terjadi pertentangan. Dengan demikian pembangunan di Indonesia dapat berjalan seperti sekarang ini. Nurcholish Madjid dianggap sebagai tokoh yang paling berjasa menyudahi atau paling tidak mengurangi saling berhadapan antara Islam dan negara. Semboyan "*Islam Yes, Partai Islam No*", menyatukan banyak orang Islam. Namun harus diakui begitu banyak tokoh Islam yang merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid. Akan tetapi kemaslahan umat, secara khusus, dan bangsa secara umum, agaknya jauh lebih penting



STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS  
Jalan Ceruk Ijuk Km. 19  
Ceruk Ijuk, Toapaya Asri, Kabupaten Bintan  
Kepulauan Riau

